

Basri Pengganti Santoso ITU AKHIRNYA MENYERAH

POSO (TERBITTOP) — Basri anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur pengganti Santoso, tertangkap hampir secara kebetulan sesudah anak buahnya ditemukan tewas karena hanyut di Sungai Puna.

Juru bicara Kepolisian RI, Irfen Boy Rafli Amar menyebutkan penangkapan terjadi pada pukul 09.00 WITA (08.00 WIB), Rabu (14/9) lalu. Disebutkannya, saat itu Satgas Tinombala

sedang melakukan patroli mencari sisa-sisa anggota terduga kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang dikenal juga sebagai Kelompok Santoso di sekitar perkebunan Dusun Gantinati, Desa Tengkur, Kecamatan Poso Pesisir, Poso.

Saat itu, kata Boy Rafli, ditemukan laki-laki tersebut dan dilakukan penangkapan. "Dia menandatangani tangan, menyerah." **► Bersambung ke Halaman 11**

'Pemerintah dan DPR Bersikap Tidak Cerdas'

Oleh: Petrus Selestinus SH

DPR dan pemerintah harus cerdas dan rasional dalam menilai dan membedakan sikap ketataatan seorang pejabat terhadap sebuah undang-undang dengan sikap koreksi atau uji konstitusionalitas sebuah undang-undang terhadap UUD 1945. Pada saat ini DPR dan Pemerintah menuduh Ahok bersikap tidak konsisten karena pada waktu kampanye Pilgub 2012, Ahok meminta Foke untuk mengambil cuti ketika jadwal kampanye tiba, kok sekarang Ahok malah menggugat pasal cuti petahana saat kampanye ke MK untuk dibatalkan.

Kalau saja benar bahwa Ahok saat itu meminta Foke harus cuti untuk kampanye, ka-

rena memang saat itu ketentuan tentang cuti petahana pada saat kampanye menjadi ketentuan hukum positif, sehingga wajib diingatkan untuk dilaksanakan. Sedang Ahok saat ini bukan menolak berkampanye dan menolak mengambil cuti untuk kampanye, melainkan Ahok melakukan koreksi terhadap pasal-pasal dalam UU Pilkada yang mengatur tentang cuti selama masa kampanye, yang menurut Ahok ketentuan tentang cuti selama masa kampanye akan merugikan hak-hak dan kewenangannya kon-

stitusionalnya sebagai orang yang mencalonkan diri kembali sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Karena itu DPR dan pemerintah harus secara cerdas dan menggunakan akal sehat agar tidak salah dalam menilai gugatan Ahok tentang pasal cuti petahana dalam UU Pilkada. Mengapa karena menyikapi gugatan Ahok ke MK, DPR dan pemerintah menganggap gugatan yang dilayangkan oleh Ahok sebagai

► Bersambung ke Halaman 11



facebook.com/terbittop

instagram.com/terbittop

terbittop

redaksiterbittop@gmail.com

www.terbittop.com

KORAN

TERBITTOP

Berani Mengupas Jelas Mengulas

Harga Rp5000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

16 - 28 SEPTEMBER 2016

TAHUN KE-III EDISI LXXV

'TUNTUT JESSICA SESUAI FAKTA'

Jampidum: Tim Jaksa Harus Konsisten Membuktikan

JAKARTA (TERBITTOP) — Sidang perkara kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selalu menyedot perhatian publik. Bahkan ketika saksi Beng Beng Ong ahli patalogi yang didatangkan dari Australia menjadi saksi ahli meringankan untuk Jessica, membuat pembuktian perkara ini menjadi fakta baru yang bisa membebaskan Jessica. Mungkinkah jaksa menuntut bebas Jessica?

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Dr Noor Rochmad SH, MH menegaskan, agar semua jaksa penuntut umum untuk tetap konsisten dalam menuntut Jessica Kumala Wongso. "Saran saya konsisten dengan komitmennya akan membuktikan dakwaannya itu," kata Noor Rochmad di Kejaksaan, pekan lalu. Dia menambahkan, jaksa harus kuat bertempur dalam persidangan agar tuntutan ke-

jaksaan dapat dikabulkan hakim. "Semua jaksa yang menyidangkan perkara harus tetap konsisten membuktikan. Jaksa itu fungsinya ketika dia mendakwakan si A berbuat A, kemudian dia harus membuktikan, buktinya apa yang didakwakan itu sesuai fakta persidangan. Harus tetap *light* untuk membuktikan dakwaannya itu," tegas Noor Rochmad. Dia meminta masyarakat untuk tidak cepat-cepat menyimpulkan persidangan yang

disiarkan langsung oleh beberapa televisi. "Mengambil sisi yang hanya sekelumit, ini jangan menyimpulkan seperti itu tidak boleh, lihat dulu perkembangannya. Kita kan bukan ke opini, kita ke fakta persidangan. Faktanya apa, nanti jaksa akan menyimpulkan dalam tuntutan, baru hakim akan memutuskan," tandasnya.



Jampidum Dr Noor Rochmad SH, MH

Meski persidangan dengan menghadirkan sejumlah saksi ahli dari luar negeri sekalipun, semua terputung dengan fakta di persidangan. Bahkan pemeriksaan saksi dan terdakwa belum dilakukan. "Jadi biarlah fakta persidangan yang akan

menentukan perkara itu," ujarnya.

Pengacara Jessica, Otto Hasisbuan SH mengatakan, merasa menemukan kejutan luar biasa. Menurut Otto, dari keterangan ahli tersebut seharusnya memastikan kasus Jessica tidak dilanjutkan. "Jadi kalau misalnya negatif, sebenarnya ini *nggak* ada kasus, kalau su-



Jessica Kumala Wongso

DIHUJAT BERTUBI-TUBI Marshanda Memilih Diam

JAKARTA (TERBITTOP) — Artis peran Marshanda mendapat hujatan. Bukan dari para *haters* alias pembecinya, tapi dari mantan pacarnya, Egi John.

Lewat akun pribadinya, Egi John menuding Marshanda sebagai seorang wanita yang materialis dan suka selingkuh. Bahkan, di luar dugaan, pada Senin lalu Marshanda dituliskan, di akun Instagramnya pernah menderita penyakit kelamin.

"Setelah saya lamar dan salat malam istiqarah minta petunjuk sinyal sama Allah. Saya *nganterin* AM ke RS Mayapada TB Simatupang katanya mau *check up obgyn*," tulis Egi John, sambil menyebet

► Bersambung ke Halaman 11



Marshanda

Lampau Rekor Ronaldo MESSI CETAK ENAM HATTRICK

BARCELONA (TERBITTOP) — Dalam laga matchdat pertama Grup C Liga Champions antara Barcelona lawan Glasgow Celtic, Lionel Messi tampil brilian. La Pulga membukukan tiga gol dalam laga yang dimenangkan Barca dengan skor 7-0 tersebut.

Messi mencetak gol menit ketiga, ke-27 dan ke-60. Itu hattrick keenam Messi dalam ajang Liga Champions. Dengan begitu, Messi menjadi pemain pertama yang bisa mencetak enam *hattrick* dalam sejarah Liga Champions format baru. Artinya, Messi pemain pertama yang sukses mencetak enam *hat-*

trick di Liga Champions sejak 1992.

Messi juga tercatat membukukan tiga gol atau lebih dalam satu pertandingan ketika Barca kontra Arsenal, Viktoria Plzen, Leverkusen, Ajax, Apoel dan Celtic. Sebelumnya Messi sejajar bersama Ronaldo mengoleksi lima *hattrick*. Dengan fakta ini, Messi telah melampaui Ronaldo pesaing utamanya.

Ronaldo mencetak *hattrick* di Liga Champions saat menghadapi Ajax, Galatasaray, Shakhtar, Malmö dan Wolfsburg. (bln)



Lionel Messi

MARY JANE di Tengah Pembicaraan Dua Presiden

JAKARTA (TERBITTOP) — Terpidana mati Mary Jane Fiesta Veloso, pada pekan lalu, jadi bahan perbincangan dua presiden: Jokowi dari Indonesia dan Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte.

Kedua presiden jadi sorotan publik untuk perkara yang sama, yakni pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Dalam dua tahun, pemerintah Jokowi mengeksekusi belasan terpidana mati kasus narkoba dalam tiga tahapan. Sedangkan Duterte, panggilan akrab Duterte, yang berkuasa sejak 30 Juni lalu, menembak mati sekitar 2.000 bandar dan pengedar narkoba di negaranya.

► Bersambung ke Halaman 11



Mary Jane Fiesta Veloso

Bang TOP...

- Jampidum berharap jaksa perkara Jessica tetap konsisten.
- Kita lihat saja fakta persidangan bro!!!



Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun

Sege nap Dimpinan dan Staf Redaksi

KORAN
TERBITTOP

Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya
Drs H TARMAN AZZAM MSc

Dalam usia 67 tahun

(Wartawan Senior/Ketua Dewan Kehormatan PWPengurus Ikatan Alumni Lemhanas
Penasihat dan Pelindung Koran TERBITTOP/Tokoh Masyarakat Babel)

Wafat Jumat, 9 September 2016 pukul 08.45 WIT atau 06.45 WIB di Ambon, Maluku.
Almarhum/dikebumikan Sabtu, 10 September 2016 di TPU Pondok Kelapa Jakarta Timur.

Semoga amal dan ibadah almarhum diterima di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan serta kesabaran dalam menerima cobaan dari Allah Swt.



Sehubungan dengan banyaknya pengaduan ke Redaksi, dengan ini kami beritahukan bahwa wartawan Koran TERBITTOP adalah yang tercantum di box redaksi, dan dalam melaksanakan peliputan selalu dilengkapi ID Card TERBITTOP.

Narasumber wajib menyanikan identitas wartawan yang melakukan wawancara. Kami tidak bertanggung jawab atas tindakan para pihak yang mengaku-ngaku wartawan Koran TERBITTOP, tetapi namanya tidak tercantum di box Redaksi Koran TERBITTOP edisi terbaru.

HOTLINE REDAKSI: 0822-9946-6193

"Selamat Jalan Bang Tarman Azzam"

JAKARTA (TERBITTOP) — Penasihat dan Pelindung Koran TERBITTOP yang juga seorang wartawan senior, Tarman Azzam yang menjabat ketua Dewan Penasihat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), meninggal dunia di Ambon, Jumat, 9 September 2016, sekitar pukul 08.45 WIT.

Dia meninggal di salah satu kamar hotel yang berada di kawasan Tanah Tinggi Ambon. Tarman Azzam saat itu hendak menghadiri puncak pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) yang digelar di Ambon sejak Kamis, 8 September 2016. Pengakuan Pelaksana Tugas Ketua PWI Maluku Frejon Toumahu, sebelum meninggal Tarman Azzam memang sempat dikabarkan kondisi kesehatannya menurun.

"Saya ke hotel sudah meninggal, ada sempat pasang oksigen," kata Frejon.

Almarhum sebelum menghadiri peluncuran HPN lokal menyempatkan diri mengunjungi pesona wisata belut air tawar maupun pantai Desa Tulehu dan Pantai Liang, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon.

Bersama Rosihan Anwar, Tarman Azzam pernah menerima penghargaan sebagai Tokoh Wartawan Dunia Melayu dari Asosiasi Mantan Wartawan Berita Harian Malaysia. Pemberian penghargaan itu diberikan oleh Menteri Besar Selangor Dr Mohamad Khir Toyo dan Presiden Asosiasi Mantan Wartawan Berita Harian Malaysia (PBWBHM) di sebuah hotel di Petaling Jaya, Selangor, Malaysia, 1987. Tarman Azzam selama dua periode, 1998-2003 dan 2003-2008 menjadi ketua umum Persatuan Wartawan



BERIKAN ARAHAN — Ketua Dewan Penasihat PWI Pusat Tarman Azzam yang juga menjadi Penasihat Koran TERBITTOP saat berada di ruang Redaksi Koran TERBITTOP memberikan arahan bidang redaksi. Tarman Azzam meninggal saat itu hendak menghadiri puncak pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) yang digelar di Ambon sejak Kamis (8/9).

Indonesia (PWI).

Dia sempat menjabat sebagai pemimpin redaksi Harian Terbit (Grup Poskota) dan ketika koran itu dijual tahun 2013, dia mau bersama-sama mendirikan koran mingguan TERBITTOP dan duduk menjadi penasihat. Bahkan ketika koran di awal-awalnya berdiri dan membutuhkan biaya untuk penerbitan, almarhum mengajak para pendiri yang terdiri Haris Fadillah dan Endang Suherman membuat kerja dengan Yayasan Damandiri yang diketuai Prof Dr Haryono Suyono.

Kini Koran TERBITTOP kini sudah beredar di 10 provinsi di Indone-

sia. Pemimpin Umum Koran TERBITTOP Haris Fadillah mengatakan, sebelum almarhum berangkat ke Ambon sempat saling bicara di telepon, beliau telah berencana untuk bertemu dengan kami membicarakan pengembangan koran ini sepulang dari Ambon.

"Saya saling menelepon almarhum secara rutin dan slalu memberikan spirit dalam menerbitkan koran dan media TERBITTOP. Sebelum beliau berangkat, beliau berjanji untuk bertemu dengan Redaksi Koran TERBITTOP sepulang dari dari Ambon. Tapi Tuhan berkehendak lain. Kami merasa ke-

hilangan seorang sosok rekan yang bersahaja, akrab dan rendah hati serta selalu memberikan petunjuk dan nasehat sebagai seorang wartawan senior selama ini," kata Haris.

Keterangan yang dihimpun selama berada di Ambon, ia mengungkap di salah satu hotel di Kota Ambon. Sebelum meninggal, Ketua Dewan Penasihat PWI Pusat itu sempat menelepon salah seorang pengurus PWI, Noh Hatumena, yang juga ke Ambon untuk menghadiri HPN 2017, karena semalaman tidak bisa tidur.

Menurut Noh Hatumena, sebelum meninggal, Tarman juga sem-

pat menelepon istrinya di Jakarta dan mengabarkan bahwa kondisi kesehatannya kurang baik.

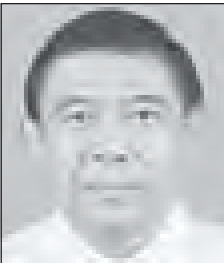
"Mah, doain agar bisa tiba dengan selamat di rumah," kata Noh Hatumena, menirukan ucapan Tarman, Jumat siang.

Tarman juga sempat menelepon Suaedi Marasabessy dan mengabarkan kondisi kesehatannya yang kurang baik. "Semalam saya kurang tidur," ujar Marasabessy menirukan ucapan Tarman.

Ketika Noh Hatumena dan Suaedy Marasabessy menemani dalam kamar, saat itulah Tarman jatuh di kamar mandi. Pertolongan medis sempat diberikan, tapi ia mening-

gal 30 menit kemudian.

Jenazah Tarman diterbangkan ke Jakarta. Gubernur Maluku Said Assagaff, Panglima Kodam 16 Pattimura Mayor Jenderal Doni Monardo, dan Sekda Maluku Hamin bin Taher ikut melayat jenazah Tarman di Rumah Sakit Tentara Dr Latumeten, Ambon. Ketua Ikatan Alumni (Ikal) Lemhanas Agung Gumelar beserta para pengurus Ikal Lemhanas lainnya ikut menyampaikan ucapan ber bela sungkawa. Almarhum dikebumikan di TPU Pondok Kelapa Jakarta Timur. Selamat jalan Bang Tarman Azzam semoga khusnul khatimah. (nt/end)



TOP SOROT

'Korupsi Plus Ibadah'

Haris Fadillah

SUNGGUH ironis tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala daerah makin mengurita. Apalagi sejak diberlakukan UU Otonomi Daerah seperti kepala daerah makin banyak terjerat korupsi. Bupati Banyuwangi, Sumatera Selatan terakhir menjadi operasi tangkap tangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena menerima suap, yang dananya dipakai untuk naik haji. Tak hanya itu, uang pelicin dari pengusaha yang mengincar proyek di daerahnya diterima saat digelar pengajian menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Perbuatan Yan Anton Ferdian dalam dua sesi yang bertolak belakang yakni, korupsi dan ibadah.

Perbuatan ini menambah deretan kepala daerah terjerat korupsi. Sebelumnya mantan bupati bangkalan Fuad Amin Imron ditangkap karena tersangkut korupsi dan kini sudah menghuni rumah tahanan.

Seingat saya sudah lebih dari dari seratus kepala daerah menjalani pemeriksaan ada yang berstatus saksi ada tersangka dan sudah menjadi terdakwa. Sejak tahun 2012, data Kementerian Dalam Negeri mencatat sedikitnya 173 kepala daerah menjalani pemeriksaan dengan status sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa dalam berbagai kasus korupsi. 2013, kementerian ini mencatat sebanyak 309 kepala daerah di Tanah Air terjerat kasus korupsi.

Jumlah tersebut termasuk kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Bupati Gunung Mas. Dua Gubernur Riau dan Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah. Sebelumnya Bupati Bogor Rachmat Yasin dan Bupati Karawang dan istrinya, Ade Swara.

Dulu jaksa agung alm Sukarton Marmaosudjono SH pernah memprogramkan Poskumdu (Pos Pelayanan Hukum Terpadu) dan Menteri Kehakiman almarhum Ismail Saleh, terkenal dengan program Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum). Namun kedua program tersebut sudah dianggap

usang, program ini sudah lama tidak digelar lagi, dan kegiatannya sudah jarang kita lihat. Kegiatan memasyarakatkan hukum bagi rakyat serta pejabat itu sudah jarang terlihat melalui program Kadarkum/Poskumdu.

Banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi menimbulkan keprihatinan semua pihak dan persoalan serius upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain karena persoalan integritas, setidaknya terdapat empat faktor pendorong korupsi bagi kepala daerah selama dia menjabat. Kost biaya politik yang tinggi selama pemilukada, dan perebutan jabatan internal di tubuh partai.

Sekiranya dua program masih berjalan tak salah calon bupati itu diwajibkan mengikuti program Puskumdu dan Kadarkum biar menjadi sadar dan patuh terhadap hukum setelah menjabat.

Selain itu masih banyak celah dalam regulasi yang bisa dipakai untuk menyimpangkan anggaran. KPK pernah mengemukakan temuan 18 modus korupsi di daerah. Dua di antaranya paling sering dilakukan kepala daerah, yaitu penggelembungan biaya (mark-up) dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Modus lainnya, penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan pribadi.

Bagaimanapun tindakan yang dilakukan kepala daerah, yang tidak mengindahkan ketentuan bahkan menyelewengkan jabatan sehingga berakibat adanya kerugian negara harus diurus. KPK, kejaksaan dan kepolisian harus mengoptimalkan dalam memberantas korupsi di daerah.

Tentu rakyat mendukung aksi tangkap tangan dan menahan kepala daerah. Bahkan hukumannya harus diperberat, karena tindakan penyelewengan itu sebagai bentuk mengingkari dan membongkangi rakyat, dengan moral rendah menjadi pemimpin. (Penulis adalah Wartawan Koran TERBITTOP dan Pengurus Ikal Lemhanas)

Foke Bisa Terseret Kasus Reklamasi

JAKARTA (TERBITTOP) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak menutup kemungkinan akan memeriksa mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo (Foke) terkait kasus proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Itu sesuai dengan permintaan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun sebelumnya, KPK meminta kepada Ahok untuk membantu memberikan informasi mengenai Foke

"Kami sangat senang sekali jika informasi itu disertai data yang cukup akurat dan kesaksian yang sesuai data. Itu sangat membantu kami," kata Kepala Biro Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Priharsa menegaskan, kasus suap reklamasi pantai utara Jakarta belum berhenti hanya menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI M Sanusi. KPK, kata Priharsa. KPK masih terus mendalami kasus terse-

but. "Untuk pendalaman dan pengembangan penyidikan, masih terus berjalan dan dilakukan," tuturnya.

Dalam keterangannya sebagai saksi dengan terdakwa M Sanusi beberapa hari lalu, Ahok mengatakan, klausul kontribusi tambahan izin prinsip reklamasi yang diberikan oleh Foke hilang. "Ada yang hilang soal kontribusi tambahan seminggu saat kami akan dilantik," kata Ahok di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/9).

Menurut Ahok, kontribusi tambahan sudah diamanatkan sejak keluarnya Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 soal Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Namun, dalam keppres tersebut belum diatur teknis berapa kontribusi tambahan yang harus dibayarkan oleh pengembang.

Dalam kasus ini, majelis hakim telah menjatuhkan vonis kepada terdakwa lainnya, yakni mantan Direktur Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja dengan huku-



Fauzi Bowo

man tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidi tiga bulan kurungan.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, yakni empat tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidi enam bulan kurungan.

Ariesman dinyatakan terbukti menyuap Sanusi sebesar Rp2 miliar untuk memuluskan pembahasan rancangan Peraturan Daerah Reklamasi Teluk Jakarta. (tng)



Yusril Ihza Mahendra

JAKARTA (TERBITTOP) — Upaya Yusril Ihza Mahendra membentuk poros baru dukungan calon gubernur DKI Jakarta dinilai belum tentu bisa memuluskan dirinya melenggang di Pilkada 2017.

Pengamat politik senior dari LIPSI Syamsudin Haris menganggap usaha Yusril dengan poros baru itu tidak lebih dari ambisi personalnya. Kesuksesan poros itu dinilai bakal sulit terwujud meski diklaim telah mendapat dukungan dari sejumlah partai politik.

"Saya tidak begitu yakin dengan poros baru ini, sebab itu kan keinginannya Pak Yusril bukan datang dari keinginan partai politik," ujarnya, pekan lalu.

Poros baru yang disebut Yusril adalah koalisi dukungan yang melibatkan Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Yusril adalah satu dari enam na-

Poros Baru Yusril Dianggap Tak Lebih Ambisi Personal

ma yang mendaftar dalam jaringan calon gubernur yang digelar Demokrat. Selain dia, Sandiaga Uno dan Hasnaen Moein yang dijuluki Wanita Emas, ikut pula dalam penjurangan.

Yusril sebelumnya mengklaim dirinya bakal diusung oleh partai dalam poros baru itu di depan pendukungnya di Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Syamsudin pesimis koalisi itu akan terwujud karena inisiatif itu tidak datang dari parpol yang disebut akan mengusung Yusril. Hal ini hanya didasarkan oleh keinginan Yusril untuk menjadi orang nomor satu di DKI.

"Bisa jadi itu menjadi salah satu faktor pentingnya, dia jelas ngapain jadi cawagub karena tidak punya kekuasaan, dia inginnya jadi cagub," ucapnya.

Sejauh ini, Syamsuddin menilai, hanya terdapat dua pasangan calon yang paling kuat mendapatkan perhatian di masyarakat DKI Jakarta. Kedua pasangan itu adalah Sandiaga dengan Mardani dan bakal calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan bakal wakil gubernurnya Djarot Saeful Hidayat. Hal ini akan

semakin kuat, menurut Syamsudin, saat PDI Perjuangan memutuskan untuk mengusung Ahok dan dipasangkan dengan Djarot.

"Kalau PDI Perjuangan sudah memutuskan mendukung Ahok-Djarot, pasti partai yang disebut dalam poros alternatif itu bisa memutuskan untuk bergabung dengan Gerindra yang mempunyai kursi terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite Pemenangan Pilkada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Andi Nurpati, menyatakan bahwa dukungan partainya terhadap Yusril bergantung pada elektabilitas yang dia miliki.

"Yusril salah satu yang mendaftar dalam mekanisme pencalonan kami. Jadi kalau dia mendapat rekomendasi dari kami, itu hal yang wajar," ujar Andi.

Meski demikian, Andi menegaskan pilihan partainya dalam hal ini tidak sekadar mempertimbangkan latar belakang bakal calon. "Yang tak kalah penting adalah elektabilitas calon, karena kami memprioritaskan faktor kemenangan," kata dia. (cnn)

| TARIF IKLAN DISPLAY UMUM | | TARIF IKLAN ADVETORIAL | |
|------------------------------|--|-------------------------|-----------------|
| BERWARNA (FC) | | HITAM PUTIH (BW) | |
| 1 Halaman Belakang | : 7 kolom x 530 mm x Rp 7.500 = Rp 27.825.000 | 1 Halaman Dalam | : Rp 10.000.000 |
| 1/2 Halaman Belakang | : 7 kolom x 260 mm x Rp 7.500 = Rp 13.650.000 | 1/2 Halaman Dalam | : Rp 7.000.000 |
| 1/4 Halaman Belakang | : 3 1/2 kolom x 260 mm x Rp 7.500 = Rp 6.825.000 | 1/4 Halaman Dalam | : Rp 3.000.000 |
| 1/4 Halaman Depan | : 3 1/2 kolom x 260 mm x Rp 15.000 = Rp 13.650.000 | BERWARNA (FC) | |
| Halaman Depan (Kuping) | : Rp 4.000.000 | 1 Halaman Belakang | : Rp 12.500.000 |
| HITAM PUTIH (BW) | | 1/2 Halaman Belakang | : Rp 7.500.000 |
| 1 Halaman Dalam | : 7 kolom x 530 mm x Rp 5.000 = Rp 18.550.000 | 1/4 Halaman Belakang | : Rp 5.000.000 |
| 1/2 Halaman Dalam | : 7 kolom x 260 mm x Rp 5.000 = Rp 9.100.000 | | |
| 1/4 Halaman Dalam | : 3 1/2 kolom x 260 mm x Rp 5.000 = Rp 4.550.000 | | |
| Iklan Keluarga/Duka | : Rp 3.000/mm kolom | | |
| Tarif Iklan Display Berwarna | : Rp 16.000/mm kolom | | |
| Hitam Putih | : Rp 9.000/mm kolom | | |
| Sosial | : Rp 6.000/mm kolom | | |

KONTAK PEMASANGAN:
BUNGARIA SAPUTRI
0822 9946 6193



Rohadi

JAKARTA (TERBITTOP) — Hendra Heriansyah yang merupakan pengacara panitera Jakarta Utara Rohadi, mengaku bahwa kliennya terindikasi mengurus perkara di Mahkamah Agung.

"Memang yang kami ketahui terkait penyidik gratifikasi adalah pada saat Pak Rohadi bertugas di Pengadilan Negeri Bekasi. Dan ada indikasi dia mengurus perkara di MA.

Ada Indikasi Rohadi Urus Perkara MA

"Nah sejauh mana dan untuk berapa nilai dan kasus apa saja yang dia urus dan terima dari siapa saja, itu kewenangan dari penyidik untuk memuktikannya. Kalau dari Pak Rohadi tentu dia akan 'defense', akan bertahan bahwa sangkaan itu tidak benar," kata Hendra di gedung KPK Jakarta, Jumat.

Rohadi terjerat tiga kasus di KPK, pertama, ia didakwa menerima Rp50 juta untuk membantu mengurus penunjukkan majelis yang menyidangkan perkara Saipul Jamil dan menerima Rp250 juta bersama-sama dengan menerima Rp50 juta untuk membantu mengurus penunjukkan majelis yang menyidangkan perkara Saipul Jamil untuk mempengaruhi putusan perkara Saipul Jamil yang ditangani Ifa.

Kasus kedua, Rohadi disangkakan menerima gratifikasi untuk kasus yang tengah diproses di MA saat menjadi panitera pengganti di PN

Jakarta Utara dan PN Bekasi dan ketiga Rohadi disangkakan sebagai tersangka pelaku pencucian uang.

"Memang tidak bisa dipungkiri ada pengakuan dari Rohadi saat penyidikan mengenai adanya uang Rp1,1 miliar yang pengurusan di MA untuk kasus Papua itu," ungkap Hendra.

Rohadi juga termasuk orang yang suka membagi-bagikan uang di lingkungan tempat tinggalnya. "Memang Pak Rohadi dikenal sebagai tokoh Indramayu yang memiliki rasa empati dan sosial yang tinggi, baik untuk urusan keagamaan dan sosial. Pak Rohadi prinsipnya selama dia bisa memberi khususnya untuk Indramayu, dia akan berikan. Adapun sumber uangnya dari mana ya kita tidak tahu," tambah Hendra.

Menurut Hendra, Rohadi punya beberapa usaha, salah satunya penyewaan kapal. "Saya ketahui Pak Rohadi punya beberapa kapal, disewakan dan juga punya beberapa

pa kendaraan yang disewakan yaitu kapal penangkapan ikan. Awalnya satu, lalu jadi dua, lalu saya dengar berkembang menjadi empat dan seterusnya. Adapun jumlah mobil yang dia miliki ada yang dibeli kontan, 'leasing' kemudian direntalkan, jadi wajarlah. Cuma jangan ditanya dari mana sumbernya. Saya tak bisa menjawab," ucap Hendra.

Terkait perkara ini, KPK sudah menyita satu unit ambulans, satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport milik Rohadi. "Ambulans ini kan sifatnya sosial yang digunakan untuk kepentingan sosial menyangkut orang sakit. Perlakuan terhadap ambulans ada perlakuan khusus. Artinya semestinya tidak dilakukan penyitaan kepada ambulans," jelas Hendra.

Sedangkan untuk RS milik Rohadi yaitu RS Reisa di Indramayu juga masih ada beberapa persyaratan yang belum lengkap meski sudah beroperasi. (nt)

SINGKAT

KPK Imbau Budi Gunawan Segera Laporkan Kekayaan

JAKARTA (TERBITTOP) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Jenderal Budi Gunawan, yang baru saja dilantik menjadi kepala Badan Intelijen Negara (BIN), segera melaporkan harta kekayaannya. Sebab, sejauh ini lembaga anti-korupsi itu baru menerima laporan harta kekayaan Budi pada 2013. Laporan yang dimiliki KPK itu merupakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) saat Budi menjabat kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian. "Semua penyelenggara negara dilantik atau mutasi semua harus melaporkan LHKPN, termasuk juga menteri reshuffle harus lapor LHKPN," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriani dilansir viva.co.id, pekan lalu. Menurut Yuyuk, Budi harus menjadi teladan para penyelenggara negara lain, dengan menyerahkan LHKPN yang nantinya ditelaah KPK. Apabila pelaporan ini merupakan amanat undang-undang untuk transparansi dan bersih dari korupsi. (nt)

Aturan Jerat Korupsi Korporasi Segera Terbit

JAKARTA (TERBITTOP) — Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Tanggung Jawab Pidana Korporasi yang dapat menindak korporasi karena diduga terlibat dalam kasus korupsi segera terbit. "Tunggu saja sebentar lagi akan ditandatangani," kata Hakim Agung Surya Jaya di Gedung KPK Jakarta, Kamis. Namun Surya Jaya tidak menjelaskan mengenai waktu penandatanganan Perma tersebut. "Tunggu saja sebentar lagi, draftnya sudah selesai," tambah Surya. Panitia penyusunan perma tersebut adalah MA, KPK, kepolisian dan Kejaksaan Agung, sedangkan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menjadi ketua panitia tersebut. Landasan hukum penggunaan korupsi korporasi sebenarnya sudah ada dalam Pasal 20 No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (nt)

Surya Paloh Berhalangan Jadi Saksi Tersangka Korupsi



BERHALANGAN HADIR — Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh berhalangan hadir memenuhi panggilan KPK untuk menjadi saksi terkait kasus dugaan suap yang melibatkan anggota DPRD Sumut.

JAKARTA (TERBITTOP) — Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh berhalangan hadir menjadi saksi meringankan tersangka kasus dugaan korupsi anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara Budiman Pardamean.

"Bapak Surya Paloh tidak dapat memenuhi permintaan itu karena tidak memiliki pengetahuan apa pun, tidak pernah mengalami, tidak melihat, dan tidak mendengar perkara yang disangkakan kepada tersangka

ka," kata Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari di Jakarta, Sabtu. Taufik menyebutkan permintaan Budiman menjadikan Surya Paloh sebagai saksi menguntungkan yang diajukan Budiman. Pria yang sebelumnya berprofesi sebagai penga-

ga tidak dapat dipenuhi. Ia membenarkan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat panggilan terhadap Surya Paloh menjadi saksi meringankan sebagai permintaan dari tersangka Budiman.

Namun, menurut Taufik, KPK hanya memfasilitasi permintaan tersangka menjadikan Surya Paloh sebagai saksi menguntungkan yang diajukan Budiman. Saat menerima surat permintaan menjadi saksi itu, Surya Paloh sedang menja-

lani kegiatan di luar negeri sehingga tidak dapat langsung menjawab surat tersebut. Taufik tidak mengetahui alasan Budiman meminta Surya Paloh menjadi saksi meringankan. Namun, berdasarkan informasi, tersangka korupsi itu juga mengajukan beberapa tokoh nasional lain menjadi saksi meringankan.

Surya Paloh, kata dia, mendukung dan menghormati upaya tugas dan kewenangan KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi. (nt)

Aguan Bantah Kucurkan Rp50 Miliar

JAKARTA (TERBITTOP) — Bos Agung Sedayu Group, Sugiyanto Kusuma alias Aguan, mengaku tidak pernah menjangkakan pemberian uang sebesar Rp50 miliar kepada sejumlah pimpinan DPRD DKI Jakarta agar mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

"Tidak pernah ada," kata Aguan seperti dilansir viva.co.id, saat bersaksi untuk terdakwa Mohamad Sanusi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pekan lalu. Majelis Hakim juga mengonfirmasi kemungkinan apakah permintaan itu disampaikan melalui Presiden Direktur Agung Podomoro Land ketika itu Ariesman Widjaja. Namun Aguan kembali membantahnya. "Tidak pernah ada," ujar Aguan.

Sebelumnya, Aguan disebut menyetujui pemberian uang sebesar Rp50 miliar kepada sejumlah orang di DPRD DKI guna percepatan pembahasan Raperda RTRKS Pantai Utara Jakarta. Keterangan itu diungkapkan Dirut PT Kapuk Naga Indah, Budi Nurwono, yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pada keterangannya dalam BAP, Budi mengungkapkan mengenai pertemuan di kediaman Bos Agung Sedayu Group, Sugiyanto Kusuma alias Aguan pada Januari 2016. Pertemuan itu dihadiri oleh Ariesman Widjaja yang masih menjabat Presiden

Direktur Agung Podomoro Land serta sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta.

Masih pada keterangannya, Budi menyebut ada pembahasan mengenai percepatan pembahasan pengesahan raperda mengenai reklamasi. Bahkan, Budi mengungkapkan adanya permintaan uang Rp50 miliar kepada Aguan dalam pertemuan itu.

Budi mengaku tidak mengenali pihak yang meminta uang tersebut. Dia menduga permintaan tersebut datang dari orang-orang DPRD DKI. Menurut Budi, Aguan kemudian menyanggupi permintaan uang tersebut. "Yang menyanggupi Aguan, dalam rangka kelancaran sidang paripurna RTRKSP. Sudah dikasih atau belum, saya tidak tahu," ujar Budi kepada BAP yang dibacakan jaksa.

Budi sempat meminta keterangannya dalam BAP itu dicabut pada saat persidangan dengan terdakwa Ariesman. Namun hal tersebut ditolak hakim. Aguan sendiri nampak adanya kehadiran Budi Nurwono dalam pertemuan di rumahnya tersebut.

Dia mengungkapkan, pertemuan itu dihadiri oleh Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD yang juga Ketua Balegda Mohamad Taufik, anggota DPRD sekaligus anggota Balegda Mohamad Sanusi dan Ongen Sangaji, anggota DPRD sekaligus Ketua Pansus Reklamasi Selamat Nurdin serta Presdir Agung Podomoro Land ketika itu, Ariesman Widjaja. (nt)

Polisi Bidik Gatot dengan UU Perlindungan Anak

JAKARTA (TERBITTOP) — Kepolisian Daerah Metro Jaya langsung menyikapi laporan wanita berinisial CT (26) yang mengaku sebagai korban pemerkosaan Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) Gatot Brajamusti.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengatakan, pihaknya tengah memastikan usia CT. Sebab, CT mengaku diperkosa Gatot untuk pertama kali pada usia 16 tahun 10 bulan.

Jika benar, Gatot bisa dijerat dengan pasal UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. "Kami sedang periksa akta kelahirannya. Kalau memang waktu kejadian itu betul yang bersangkutan di bawah umur, tentu nanti (Gatot) bisa dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak," kata Awi kepada CNNIndonesia.com. Saat ini penyidik masih mendalami laporan dan sejumlah informasi pendukung.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Subdirektorat Remaja Anak Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda

Metro Suparmo mengatakan, sedang memeriksa CT sebagai pelapor sejak pukul 14.30 WIB. "Iya (CT) sedang diinterogasi dan divisum di Ditreskrimum," kata Suparmo.

Dia menjelaskan, langkah ini ditempuh polisi untuk mendalami laporan yang telah dibuat CT bersama kuasa hukumnya.

Suparmo menambahkan, pihaknya juga akan memeriksa sejumlah saksi lagi untuk mendapatkan fakta terkait laporan yang telah dibuat oleh CT. Polisi juga akan memeriksa Gatot. Namun, dalam hal ini Gatot hanya diperiksa sebagai saksi terlapor. "Jadi pemeriksaan korban, dan wawancara saksi," katanya.

CT melaporkan Gatot ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerkosaan. Awalnya CT hanya penyanyi latar dalam salah satu lagu yang dinyanyikan Gatot.

Setelah kerja sama itu, CT mengaku kerap diajak Gatot untuk berhubungan intim. Ia dicekoki sabu dan ekstasi serta minuman keras. Pelecehan seksual itu berlangsung tahun 2007 hingga 2011. (cnn)

Jaksa Agung Lantik 317 Jaksa Baru

JAKARTA (TERBITTOP) — Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan, keteguhan dari segala bentuk intervensi adalah dengan menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional dan proporsional. "Keteguhan hati tersebut harus di tanamkan dalam diri sebagaimana layaknya belajar dari sebuah pepatah 'Sekali layar berkembang, pantang surut ke belakang'. Sekali terjun memberantas kejahatan dengan segenap integritas, pantang bagi kita untuk mundur walau sejenkal pun."

Demikian ditegaskan Jaksa Agung RI HM Prasetyo SH saat menyampaikan sambutan pada Pelantikan dan Penutupan Diklat Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan 73 gelombang I di lapangan apel Badan Diklat Kejaksaan RI, pekan lalu.

Dikatakan, seorang jaksa dituntut untuk memiliki pengetahuan tertentu dalam melaksanakan tugasnya, untuk itu, Jaksa Agung berharap para jaksa baru dapat memahami dengan baik syarat minimal pengetahuan tersebut. "Di samping ilmu pengetahuan, seorang aparat penegak hukum juga harus memiliki ke-



Jaksa Agung didampingi Kepala Badiklat Muhammad Salim menyematkan tanda pangkat efektif, pin jaksa dan pin Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) kepada peserta terbaik saat Pelantikan dan Penutupan Diklat Pembentukan Jaksa Angkatan 73 gelombang I di lapangan Badiklat Kejaksaan, pekan lalu.

beranian yang matang, serta diikuti dengan keinginan untuk terus belajar dan mencari kebenaran, bukan pembenaran," terangnya. Prasetyo juga berharap kepada jaksa muda sebagai jaksa baru akan mampu membawa aroma segar

dengan sikap mental yang tangguh yang akan mampu berperan dan memberi kontribusi andil untuk memulihkan kembali citra dan kepercayaan publik kepada Korps Adhyaksa.

Jaksa Agung didampingi Kepala Badan Diklat Muhammad Salim me-

nyematkan tanda pangkat efektif, pin Jaksa dan pin Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) serta mengalungkan selempang bertuliskan Prima Adhyaksa kepada peserta terbaik pertama dan memberikan medali khusus kepada 10 lulusan terbaik yaitu: 1. Donny Mahendra Sanny, 2. Ria Sulistyowati, 3. Erwin Ade Putra Silaban, 4. Gilang Tofani Soewito, 5. Nur Fitriyani, 6. Firso Yan Prasanto, 7. Endang Pakpahan, 8. Adhien Widigdo, 9. Krisna Lintang Satrio, dan 10. Iman Fauzi.

Kepala Badan Diklat Muhamad Salim mengatakan, Diklat PPPJ angkatan 73 gelombang I yang diselenggarakan dari 14 Maret hingga 9 September itu berjumlah sebanyak 320 peserta yang berasal dari Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri ini terbagi menjadi delapan kelas.

Dan berdasarkan hasil penilaian sikap dan disiplin, terangnya, terdapat dua orang peserta yang melakukan pelanggaran berat, dan dua orang peserta yang tidak berhasil dalam akademik. Selain itu turut dilantik satu orang yang tertunda pelantikannya dari angkatan 72 gelombang II tahun 2015. (wartabadiklat/ris)

Tarif Putusan Hakim

PUTUSAN hakim terhadap terdakwa ternyata memiliki harga yang tidak sedikit, sehingga seringkali kita saksikan sejumlah hakim menerima suap terkait dengan putusan perkara yang diperiksa di persidangan. Meski remunerasi hakim telah disetujui diberikan tetapi sang pengadil masih sering kita dengar tergiur godaan yang haram. Bahkan dua tahun lalu salah satu ruang kantor Pengadilan Negeri Bandung menjadi tempat transaksi mafia peradilan.

Kini dalam perkara yang terkait dengan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang menjerat Saiful Jamil terungkap dalam dakwaan jaksa di pengadilan tipikor, ada tarif agar putusan ditinggalkan.

Ironis memang putusan hakim ada tarifnya jika ini sampai terbukti maka semakin bertambahnya praktik mafia peradilan di negeri ini. Di tengah lilitan gurita korupsi dan gencarnya KPK memberantas penggarong uang rakyat. Malah penegak hukum asyik menerima uang suap. Kita masih ingat kasus Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono, kasus Hakim PTUN Medan, kasus hakim Syarifuddin dianggap terbukti menerima suap Rp250 juta dari kurator Puguh Wirawan terkait kepengurusan harta paliit PT SkyCamping Indonesia.

Seorang hakim yang tertangkap tangan oleh penyidik KPK karena diduga menerima suap dari pihak swasta bernama Asep berkaitan dengan pengurusan perkara korupsi dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung berupa tahun lalu. Penyidik menemukan barang bukti uang Rp150 juta. Dan menetapkan empat orang tersangka Setyabudi Tejocahyono, Asep, Herry Nurhayat serta Toto Hutagalung. Selain kasus hakim seperti di atas, kita sering kali juga membaca di media panitera pengadilan diadili karena menjadi pintu masuk suap hakim dan penundaan salinan putusan perkara.

Dalam sidang perkara penyuaan terhadap panitera pengadilan negeri Jakarta Pusat Eddy Nasution dengan terdakwa Dodi Aryanto terungkap bisnis yang dijalankan para mafia peradilan sehingga ulah mereka seolah olah hukum tidak berlaku. Kita semua sebenarnya tidak jarang merasa kecewa atas perilaku sang pengadil. Sang pengadil juga tidak kalah hebat melahirkan putusan tanpa ruh keadilan. Sehingga ICW pernah mengungkapkan sejumlah terdakwa perkara korupsi banyak dibebaskan hakim tipikor di beberapa daerah.

Kasus dugaan suap untuk meringankan putusan semakin mencoreng dunia peradilan Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan, terutama hakim dan jajarannya sekarang berada di titik nadir. Kita masih menunggu proses pemeriksaan di pengadilan tipikor terhadap sejumlah terdakwa terkait putusan perkara Saiful Jamil, bahkan kini KPK sudah menetapkan Rohadi tidak saja gratifikasi tetapi dijera dengan pasal pencucian uang. Banyak pakar berbicara, mencela dan menista peradilan kita, seakan-akan dengan adanya kasus ini maka seluruh hakim di Indonesia mempunyai sifat yang sama. Hakim yang selalu dipanggil 'yang mulia' telah melakukan perbuatan tercela. Merusak martabat dan nama baik hakim. Profesi yang telah dianggap sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi.

Tentunya kita berharap agar dunia peradilan kita yang buram itu bisa kembali memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sebagai panglima hukum di negeri ini. Rakyat mengharapkan majelis hakim yang mulia menjatuhkan putusan berdasarkan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Serta menjadikan momentum kasus suap hakim sebelumnya menjadi contoh penjatuhan sanksi pidana berefek jera guna mengambil kembali hati masyarakat pencari keadilan. (*)

DITERBITKAN OLEH:
Karya Panjang Mediatama
SIUP: 0716/10-27/PK/XII/2013
NPWP: 03.350.979.5-412.000
TDP: 10.27.3.46.05022
Website: TERBITTOP.com
Email: redaksiterbittop@gmail.com

Penasihat/Pelindung
Tarman Azzam

Penasihat Hukum
Petrus Selestinus SH

Pemimpin Umum/Penjab
Haris Fadillah

Pemimpin Perusahaan
Aswi Matrawi

Pemimpin Redaksi
Endang Suherman

Manajer IT
Endang S

Redaktur
Mat Nur, Topan

Dewan Redaksi
Tarman Azzam, Haris Fadillah,
Endang Suherman, Mustopa Abas

Staf Redaksi
Ujang Susanto, Sulastri

Sekretaris dan Administrasi Redaksi
Theos Pormes, Bungaria Saputri, Topan Husanda

Manajer Iklan/Pemasaran
Mulyadi

Desain Grafis
Budhi Permana

Sirkulasi
Karno, Yudi Permana Sandhi, Zulaila, Bima Kamandanu

Koresponden

DKI Jakarta: Dolat Munthe, Anthony R.
Depok: Abdul Aziz. **Tangerang Selatan:** Muhammad Nur.
Cirebon: Titik Sulaksana (Kokab Cirebon), Sudirdja (Cirebon).
Lebak: Gunawan, **Pandeglang:** Anwar.
Lampung: Agus Salim. **Palembang:** Wawan Setiadi.
Pekanbaru: Ikhsan. **Bangka Belitung:** Yustami, **Belitung Timur:** Eko Jssd. **Pontianak:** Ruslan. **Bengkulu:** Heri.
Bangkalan: Muhammad Arifin. **Pasuruan:** Muhammad Toha, **Cilacap:** Mashudi. **Purbalingga:** Sumarlin. **Jember:** Sumardi. **Brebes:** Sunarto. **Majalengka:** Mulyadi. **Banyuwangi:** Muksin.

Tarif Iklan: Hitam Putih Rp9.000 (per-mm kolom). Warna (Full Color) Rp16.000 (per-mm kolom). Iklan Baris Rp9.000 (per-baris). Tarif di atas belum termasuk diskon.
Bank: BRI 7202-01-002432-50-3.

Alamat Redaksi
Kavling BBM Asri
Jl H Dimun Blok B-30 Sukmajaya
Depok, Jawa Barat 16412
Hotline: 082299466193

Alamat Korespondensi
Cibubur Village C-3-1
Jl Harjamukti Cibubur, Jakarta Timur

Percetakan
PT Wahana Semesta Inter Media
(isi di luar tanggung jawab percetakan)

Seluruh wartawan dan koresponden Koran TERBITTOP adalah yang tercantum di dalam boks redaksi edisi terbaru. Di luar nama-nama yang dimuat, apabila mengaku sebagai wartawan Koran TERBITTOP bukan tanggung jawab redaksi.

Kegiatan KKN Mendapat Dukungan Internasional

Oleh: Prof Dr Haryono Suyono

PERTENGAHAN bulan Agustus lalu, menjelang peringatan Kemerdekaan RI ke-71, UIN Sunan Ampel Surabaya, yang dipimpin oleh Rektor Prof Dr H Abd A'la, MAG menggelar suatu Konferensi Internasional tentang 'University-Community Engagement' dalam pembangunan dan mendukung semua rektor UIN/IAIN dari seluruh Indonesia dan tamu-tamu internasional dari berbagai negara, antara lain dari Kanada, Malaysia, Australia dan lainnya.



UIN Sunan Ampel yang sejak beberapa tahun ini menggelar kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Posdaya itu memiliki pengalaman yang menarik dan unik untuk bersama rekan-rekannya UIN dan IAIN lainnya menggelar pengalaman mereka di lapangan, saling bertukar pengalaman dan hasil-hasil positif yang diperoleh dalam praktek para dosen pembimbing dan mahasiswanya di lapangan.

Salah satu pengalaman yang menarik digelar sebagai pameran di lobi kampus UIN Sunan Ampel yang megah itu, adalah hasil karya mahasiswanya dalam praktik bisnis. Salah satu yang modern adalah bagaimana para mahasiswa dengan cara sederhana melayani penjualan saham berbagai perusahaan terkenal, bank dan usaha lainnya. Para mahasiswa dengan teknologi canggih melalui seperangkat komputer memberi penjelasan kepada calon nasabah dengan bahasa sederhana menjelaskan harga saham beberapa perusahaan yang dilayaninya dan fluktuasi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

Dengan gaya seperti seorang penjual saham yang sudah lihai, ditawarkannya saham beberapa perusahaan dengan prospek menarik. Tidak itu saja, dengan gaya seakan mahasiswa itu ada-

lah pemilik perusahaan yang 'go public' diajaknya calon pembeli saham menikmati bahwa dengan modal sangat minimal, seorang pembeli bisa menjadi pemilik perusahaan yang memiliki nama besar dan bisa menghasilkan untung besar pula.

Di samping itu, mahasiswa yang seakan piawai itu dengan cekatan memberikan contoh apabila seseorang ingin membeli saham tidak perlu ruwet mengisi formulir tetapi cukup menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memberikan tanda tangannya. Para mahasiswa akan memakai data dalam KTP itu, dan menolng mengisi rentetan isian yang cukup ruwet itu setelah mereka mengkopi kartu itu dengan cepat. Keterangan lain yang biasa diperlukan untuk mendapatkan 'kode rahasia' seperti kepada siapa saham akan diwariskan kalau terjadi sesuatu, dan ditanyakan dengan sederhana.

Begitu juga identitas lain yang kebetulan tidak tercantum dalam KTP ditanyakan seakan mahasiswa tidak bermaksud membongkar rahasia nasabahnya. Cepat, tidak lebih dari lima-belas menit, seseorang peunat sudah akan siap terdaftar sebagai calon pemilik suatu perusahaan. Keterangan lain tentang simpanan yang dimiliki calon pemilik bisa dikirim kemudian melalui e-mail yang alamatnya dikirim melalui handphone pembeli sa-

ham, tanpa harus merasa menyesal karena dokumen itu tidak terbawa pada waktu mendaftar. Suatu transaksi yang dikerjakan oleh mahasiswa sebelum mereka menjadi sarjana, suatu pekerjaan praktek yang sangat diperlukan agar mahasiswa 'engage' dalam suatu usaha bisnis nyata.

Pada bagian lain digelar pameran batik bergaya Madiun dengan ragamnya yang menarik. Kalau biasanya batik selalu diembel embel 'label' batik Yogyakarta, Solo atau Pekalongan, dengan berani para mahasiswa memunculkan alternatif pilihan lain batik model Madiun, Madura dan lainnya, suatu inovasi dagang yang mengundang warna tersendiri.

Kegiatan ini memberi gambaran betapa bhineka tunggal ikannya tanah air Indonesia dengan ragamnya yang muncul dalam berbagai bentuk produk makanan, pakaian dan ragam seni kebutuhan hidup lainnya. Mahasiswa yang menggelar pameran sederhana itu memiliki talent yang memadai untuk menarik para peserta konferensi internasional di Kampus dengan tower kembaranya itu, sebagai kampus inovatif dengan basis keagamaan tetapi muncul lengkap dalam kegiatan bisnis yang menarik dan merangsang peserta untuk mampir dan membeli.

Bagian lain lagi dari pameran sederhana yang menarik itu adalah hasil karya para dosen dan mahasiswa

dalam bentuk publikasi ilmiah dengan konten sederhana dan praktis. Ada tuntunan membuat karya penelitian yang bisa dipergunakan oleh para dosen dan mahasiswa yang ingin mengikuti persaingan melimpahnya dana riset yang menantang. Ada publikasi tentang hasil pengembangan yang bisa menjadi garapan dengan prospek keuntungan yang melimpah.

Ada publikasi lain hasil pengembangan program 'engagement' bersama masyarakat di sekitar kampus dan dalam lapangan luas yang hasilnya prospektif menarik. Garapan itu ditulis secara ilmiah tetapi ternyata mudah dicerna. Kalau hasil karya seperti ini menjadi kebiasaan ilmiah rekan-rekan dosen pembimbing dan mahasiswa yang melakukan 'engagement' bersama masyarakat luas, kiranya perguruan tinggi kita akan dipercaya dengan bahan kuliah baru dengan referensi yang makin bumi dengan muatan lokal tetapi kaya sehingga karya ilmiah masa depan bisa makin menggali kekayaan alam dan 'wisdom' yang selama ini terpendam dalam tidak tersentuh, kaya muatan budaya dan kearifan tradisional masyarakat yang tidak kalah dibanding muatan asing.

Dari dalam arena konferensi yang kebetulan terlihat sepi pada hari terakhir, terkesan bahwa peserta internasional menaruh perhatian yang tinggi terhadap perkembangan penjabaran teori dan konsep global seperti kesetaraan gender yang cenderung diukur dari konsep-konsep formal dokumen komitmen dari lingkungan kampus atau pimpinan kampus, tidak dilihat dari banyaknya dosen dan mahasiswa perempuan yang makin menonjol dan banyak berkiprah mendukung jabatan atau mampu bersaing dengan rekannya sesama mahasiswa pria.

Kelebihan ini perlu ditonjolkan sebagai pembandingan dari komitmen berupa dokumen resmi yang merupakan ukuran dari pengembangan 'policy option' yang dibanyak belahan bumi sangat menarik. Lebih dari itu ada pula kecenderungan yang me-

ngkur opsi kesetaraan gender dari kemenangan kaum perempuan atas laki-laki dalam suatu proses persaingan, tidak atas kesediaan kedua gender untuk membangun suatu supertim yang dipesankan oleh nilai luhur bangsa kita sebagai bangsa yang menengahkan gotong royong Pancasila sebagai model kemasyarakatan yang damai dan penuh kebersamaan.

Yang menarik lainnya adalah bahwa konsep-konsep 'engagement' yang dikembangkan oleh kalangan internasional telah dipraktikkan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dengan hasil yang positif. Salah satunya disajikan oleh Rektor UIN Alauddin Makassar Prof Dr H Musafir Pababari MSI yang dari paparannya dibawakan dampak positif dari pengembangan konsep 'engagement' oleh mahasiswa dan masyarakat luas di wilayahnya.

Konsep-konsep itu, menurut raturan pengalaman Ibu Dr Hj Mufidah MAG dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, bisa sinergis dan akan memberikan dampak positif apabila dipadukan dengan praktek pengembangan pemberdayaan keluarga melalui KKN tematik Posdaya berbasis Masjid yang akhirnya dilakukan oleh ratusan UIN, IAIN dan perguruan Islam lainnya di Indonesia dengan berhasil.

Kegiatan terakhir ini diikuti dan menghasilkan nilai partisipasi yang tinggi dari takmir masjid dan umat Islam pengikutnya serta membawa dampak yang sangat menguntungkan dalam memakmurkan masjid dan sekaligus mengentaskan umat dari lembah kemiskinan. Akibatnya masjid yang umat yang melakukan 'engagement' bersama mahasiswa dan kampusnya bertambah makmur, diikuti anak-anak keluarga miskin yang bersaing dengan rekannya makin baik dan usaha ekonomi keluarga makin marak.

Suatu engagement positif muncul dari gagasan dan praktek yang digali dari 'local wisdom' bersumber dari leluhur di tanah air tercinta. (Penulis adalah Sosiolog, mantan Menko Kesra dan Taskin RI)

Konflik Bisa Membuat Keadaan Lebih Baik

Oleh: Dr Mulyono D Prawiro

TIDAK semua orang nyaman dengan adanya perubahan dalam organisasi, apalagi kalau terjadinya perubahan itu terkesan mendadak dan tidak direncanakan sebelumnya. Hal ini akan mengguncangkan organisasi dengan segala aspeknya, termasuk dengan organisasi lain yang menjadi mitra kerjanya.



Biasanya seorang pemimpin baru akan mengatakan kepada bawahannya, dan meminta untuk memilih, apakah bergabung dengan gerbong baru dan mengikuti kebijakan baru atau mengundurkan diri. Di sini akan terjadi adanya ke luar masuk karyawan, karena bisa saja yang lama tidak sepuas dengan kebijakan pimpinan baru, sehingga mereka mengundurkan diri dan mencari pekerjaan yang dirasa cocok dan nyaman.

Bagian masa lalu, sebaik apa pun kadang dianggap kuno dan tidak perlu diferuskan, karena mungkin tidak ada gunanya bagi organisasi yang dipimpinnya baru. Program-program yang tidak menguntungkan organisasi, kalau perlu diabaikan atau dihapus, sehingga mencari terobosan baru dan program-program baru yang menguntungkan organisasi itu bisa menguntungkan, baik secara materiel maupun secara kelembagaan.

Dengan munculnya perubahan, biasanya terjadi kondisi yang menimbulkan konflik, dan tidak semua konflik itu berakhir dengan positif, tetapi ada juga yang berakhir buruk. Bila konflik itu bertujuan untuk menyayangi orang lain atau berusaha untuk menolongnya, maka

konflik itu akan berakhir dengan baik. Meskipun demikian, menurut John C Maxwell, konflik itu sebenarnya bisa dihindari, salah satu cara untuk menghindari konflik adalah mengucilkan diri sendiri dari semua orang.

Kita sering mendengar tentang konflik, baik di dalam seminar-seminar atau dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam organisasi, banyak sekali muncul konflik kepentingan dan tidak sedikit yang berkelanjutan, sehingga terjadi konflik yang cukup hebat dan menggetarkan organisasi. Hampir semua orang pernah mengalami konflik, namun agak jarang yang mau untuk dikonfrontasi dan biasanya selalu menghindari.

Secara intelektual, pemecahan konflik sebenarnya tidak terlalu sulit, namun secara emosional memang bisa saja sulit. Masih menurut John C Maxwell, pemecahan konflik membutuhkan kejujuran, kerendahan hati, dan dedikasi pada hubungan. Ada beberapa langkah penting untuk membantu menghadapi konfrontasi.

Pertama, konfrontasilah dengan seseorang yang hanya jika kita mempunyai hati untuk orang itu. Dalam hampir semua situasi hubungan, melakukan konfrontasi akan paling produktif jika kita memperhatikan kepentingan orang lain,

dan mencoba melakukan konfrontasi dengan sasaran menang bagi semua atau menang bersama. Jika kita berusaha memastikan orang lain untuk menang terlebih dahulu, maka kita akan memiliki perspektif yang paling baik. Ketika kita bersiap-siap menghadapi seseorang, harus dipastikan orang itu memiliki perasaan yang sama terhadap kita.

Kedua, kita berusaha untuk bertemu secepat mungkin. Kapan pun konflik itu muncul, biasanya kita berusaha untuk menghidari, menunda-nunda untuk menghadapinya, atau kadang-kadang meminta orang lain untuk membantu memecahkannya. Bila setiap kali kita membiarkan konflik, apa pun alasannya, maka konflik itu akan menjadi kian memburuk, apalagi bila menunda-nunda konfrontasi. Persoalan akan semakin membesar dan akhirnya akan semakin menumpuk. Tidakkah baik untuk menyimpulkan berbagai persoalan dan kemudian memberikan pelajaran sejarah selama konfrontasi, akan lebih baik bila bertemu secara langsung dan saling berhadapan, itu merupakan hal yang sangat baik dan positif serta perlu dipertimbangkan.

Ketiga, carilah pengertian terlebih dahulu dan tidak

harus suatu kesepakatan. Hambatan utama pada pemecahan konflik yang positif adalah masuk ke dalam konfrontasi dengan teralalu banyak gagasan yang dipikirkan sebelumnya. Ada pepatah yang mengatakan, bahwa orang yang mempunyai pendapat sebelum mereka mengerti adalah manusiawi, namun bila orang yang mempunyai penilaian sebelum mereka mengerti, mereka itu adalah dungu. Abraham Lincoln yang memiliki keterampilan yang hebat dalam menjalin hubungan dengan orang lain mengatakan "Ketika saya siap untuk berunding dengan seseorang, saya menghabiskan se per tiga waktu berpikir tentang diri sendiri dan apa yang akan saya katakan, dan dua per tiga berpikir tentang itu serta apa yang akan ia katakan. Hal ini merupakan pedoman yang sangat baik, karena kita tidak dapat tercapai apabila fokus kita adalah diri kita sendiri".

Keempat, uraikan persoalan. Berbicara dan membuat diri kita mudah tidak mengerti, penting untuk mengambil pendekatan yang positif. Mengembangkan persepsi dan menajuhkan kesimpulan atau pernyataan tentang motif orang lain, serta memaparkan masalah kita yang disebabkan karena hal itu. Ber cerita bagaimana persoalan ini mempengaruhi perasaan kita dan mengungkapkan secara jelas serta tanpa menuduh. Di samping itu harus menjelaskan mengapa hal ini penting bagi kita, dan menyampaikan bahwa hal ini merupakan prioritas. Hal ini akan membuat mereka bisa berubah. Dalam proses ini sebaiknya tanpa merasa panas atau getir secara emosional sangatlah penting. Kita tidak harus memataikan emosi kita, tetapi perlu memastikan, bahwa kita tidak

melakukan serangan verbal kepada orang yang sedang kita hadapi.

Kelima, dorongan untuk memberi respons. Alangan indahnya bila kita memberi kesempatan kepada orang lain untuk memberikan responsnya. Kita sebaiknya peduli dan mau mendengar, seperti yang diutarakan oleh Dean Rusk, seorang politikus terkenal Amerika Serikat, bahwa "Salah satu cara terbaik untuk mempengaruhi orang lain adalah dengan telinga kita dan dengan mendengarkan mereka". Mendorong orang untuk memberikan respons akan membantu kita mengerti masalahnya dengan baik, hal ini juga memberikan peluang kepada kita untuk memproses persoalan secara emosional. Hal ini sangat penting, apabila kita bisa membesarkan hati mereka untuk memberikan respons yang otentik kepada kita. Jika mereka bisa menyampaikan pendapatnya, maka mereka tak kan mampu bergerak ke arah pemecahan masalah, mereka akan terfokus pada respons mereka sendiri, sehingga mereka tidak mendingar hal lainnya.

Keenam, setuju akan rencana tindakan. Tidak sedikit orang yang tidak suka dengan konfrontasi, namun banyak yang menginginkan resolusi atau pemecahan. Salah satu cara untuk mencapai pemecahan adalah dengan cara mengambil tindakan positif. Dengan mengembangkan dan menyetujui suatu rencana tindakan, maka kita menempatkan fokus pada masa depan, bukan pada masalah dimasa lalu. Jika orang yang kita konfrontasi ingin berubah, maka mereka akan condong pada kemungkinan untuk membuat keadaan lebih baik. (Penulis adalah Dosen Pascasarjana dan Anggota Senat Universitas Satyagama dan Universitas Trilogi, Jakarta)

'Hukum Maksimal Pelaku Obat Palsu'

JAKARTA (TERBITTOP) — Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem Irma Suryani meminta Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung menjerat para tersangka produsen dan distributor obat palsu dengan pidana maksimal, agar memiliki efek jera.

"Semua laporan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) lari ke Bareskrim. BPOM tak bisa mengawal sampai persidangan, yang terjadi masuk angin. Jadi jangan sampai masuk angin terus-terusan. Kembung," kata Irma dalam rapat bersama BPOM, Bareskrim, dan Kejaksaan Agung di DPR, Jakarta, Selasa (13/9).

Dia pun meminta keajaiban memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan, dalam mendakwa para tersangka, sehingga bisa memberatkan hukuman pada para pelaku.

Selama ini untuk hukuman ada yang hanya denda Rp1 juta. Jadi buat pengawasan komprehensif. BPOM tak sanggup sendirian apalagi mafia ini berat, karatan, dan sudah lama," kata Irma.

Dia pun berharap Kapoli baru dan keajaiban bisa menunjukkan fungsinya sebagai pelindung masyarakat. Dia juga memberikan catatan pada Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar bisa mengharmonisasikan hukuman dan denda yang diatur dalam beraturan aturan itu.

"Yang satu hukumannya 15 tahun, denda Rp5 miliar, satunya lagi dendanya Rp300 juta. UU-nya sudah beda," kata Irma.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek memprioritaskan langkah mengantisipasi masuknya wabah virus Zika ke Indonesia. Upaya antisipasi diutamakan berlaku di Kota Batam, DKI Jakarta,

Medan, dan Bali yang kerap menjadi tujuan pelancong asal Singapura dan Malaysia.

Terungkapnya produksi obat ilegal dan peredaran obat kedaluwarsa mengingatkan kembali pada kerentanan konsumen dalam isu kesehatan. Seperti belum lama ini diungkap tim gabungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menggerebek lima gudang di Kompleks Pergudangan Surya Balaraja, Banten yang memproduksi obat-obatan ilegal dengan nilai yang ditaksir lebih dari Rp30 miliar, pada Jumat (2/9) pekan lalu.

"Di lima gudang tersebut, tim gabungan menyita barang bukti 42.480.000 pil obat yang diproduksi dan diedarkan secara ilegal," kata Kepala Badan POM, Penny K Lukito, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa.

Menurutnya, jutaan pil tersebut merupakan obat ilegal dari berbagai jenis bahan baku. Lima gudang yang beralamat di Blok E-19, F-36, H-16, H-24 dan I-19, Jalan Raya Serang KM 28 Balaraja, Banten itu kini telah disegel.

Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan alat-alat produksi obat ilegal seperti mixer, mesin pencetak tablet, mesin penyulut, mesin striping dan mesin filling.

Selain itu, petugas juga menemukan bahan baku obat, bahan kemasan, produk jadi obat dan obat tradisional siap edar.

Beberapa jenis obat yang ditemukan di gudang terse-



OBAT ILEGAL — Tim gabungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri memamerkan obat-obatan ilegal hasil penggerebekan di lima gudang di Kompleks Pergudangan Surya Balaraja, Banten, Jumat (2/9) pekan lalu, yang ditaksir lebih dari Rp30 miliar.

but adalah *Trihexyphenydyl*, *Heximer*, *Dextrometorphan*, *Camophen* dan *Somadryl*. "Temuan didominasi oleh obat yang sering disalahgunakan untuk menimbulkan efek halusinasi," katanya.

Dikatakannya, *Trihexyphenydyl* dan *Heximer* adalah obat anti parkinson yang bila digunakan secara berlebihan akan menyebabkan ketergantungan dan mempengaruhi aktivitas mental.

Sementara *Tramadol* adalah obat antinyeri yang jika disalahgunakan bisa menyebabkan efek halusinasi. *Dextrometorphan* merupakan obat batuk yang menurut Penny, rentan disalahgunakan karena dapat menimbulkan efek halusinasi. "Dextrometorphan dalam bentuk sediaan tunggal sudah dilarang peredarannya oleh BPOM sejak tahun 2013," katanya.

Camophen dan *Somadryl*,

menurutnya, adalah obat nyeri otot yang mengandung bahan aktif *Carisoprodol* yang bila kerap dikonsumsi bisa menyebabkan efek halusinasi. "BPOM sudah menghentikan izin edar obat yang hanya mengandung *Carisoprodol* sejak 2013," katanya.

Sementara obat-obatan tradisional yang ditemukan oleh tim gabungan antara lain merek Pa'e, African Black Ant, New Anrat, Ge-

duk obat tradisional tersebut telah masuk daftar *public warning* di Badan POM karena mengandung bahan kimia obat *Sildenafil Citrat* yang disalahgunakan sebagai penambah stamina pria. (ant)

Polda Babel Amankan 130.153 Butir Obat

PANGKALPINANG (TERBITTOP) — Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung mengamankan 130.153 butir obat ilegal jenis tramadol dan somadryl dari sebuah toko kelontong di Jalan Damai Kelurahan Tanjung Ketapang, Kabupaten Bangka Selatan, Senin (5/7).

Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung AKBP Adi Affandi di Pangkajene, Rabu, mengatakan, obat-obatan tersebut diamankan dari dua penjual yakni, Idianto (40) dan Yeni Mardiana (31).

Keduanya menjual bebas obat-obatan itu yang seharusnya melalui resep dokter.

"Total barang bukti yang disita aparat sebanyak 130.153 pil ilegal terdiri dari 67.511 pil *Tramadol* dan 62.642 pil *Somadryl*. Dari tersangka Idianto didapatkan 67.373 pil *Tramadol* dan 62.544 pil *Somadryl*. Sedangkan dari tersangka Yeni Mardiana ditemukan 138 pil *Tramadol*, 98 pil *Somadryl* serta uang tunai Rp100 ribu," katanya.

Ia mengatakan, kasus penjualan obat-obatan ilegal tersebut berhasil diungkap setelah pihaknya melakukan proses pengintaian terhadap toko kelontong yang dicurigai menjual obat-obatan daftar G merek *Tramadol* dan *Somadryl* secara ilegal.

Toko milik KD dan YN ini telah berdiri sejak lima tahun lalu yang sehari-harinya menjual barang kebutuhan masyarakat. "Operasi dilaksanakan oleh Ditresnarkoba dan Polres Babel berdasarkan informasi dari masyarakat serta hasil penyidikan anggota kami dilapangan. Setelah diketahui dan cukup bukti, baru kami lakukan penggerebekan, penangkapan, penyitaan serta pengamanan tersangka dalam hal ini pemilik toko selaku penjual," ujarnya.

Ia menyebutkan, obat-obatan daftar *Gevaarlijk* (berbahaya) termasuk dalam kategori obat keras yang harus ada resep dokter untuk dibeli pelanggan. (ant)

Penjualan Lewat Online Ikut Menjamur

JAKARTA (TERBITTOP) — Maraknya era digitalisasi membuat menjamurnya toko online yang menjual berbagai macam kebutuhan konsumen, tidak terkecuali makanan dan obat-obatan. Dalam laporan Operasi Pangea XI Tahun 2016 di kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Jakarta, BPOM menyoroti penjualan produk obat ilegal yang dijual secara online.

"Tahun 2016 ini kami memprioritaskan pada produk peningkatan stamina dan produk pelangsing," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tengku Bahdar Johan Hamid seperti dilansir *tempo.co*.

BPOM dibantu Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, telah mengidentifikasi 214 website yang digunakan dalam penjualan dan peredaran obat ilegal.

"Kami telah memeriksa 64 sarana produksi dan distribusi," ujar Johan. "Kami juga dibantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memeriksa 6.414 paket kiriman," tambahnya.

Operasi yang diselenggarakan pada 30 Mei-7 Juni 2016 telah menyita 1.312 barang farmasi ilegal, termasuk yang palsu dengan nilai ekonomi lebih dari Rp56 miliar. Menurut Johan, tercatat 148 obat ilegal dan palsu dengan nilai ekonomi lebih dari Rp35 miliar, juga 352 produk penambah stamina ilegal dengan nilai ekonomi lebih dari Rp10 miliar berhasil diamankan dan produk obat pelangsing yang berjumlah 24 item dengan nilai ekonomi mencapai Rp2 miliar serta produk lainnya hingga mencapai Rp56 miliar.

Johan mengungkapkan modus pelaku mengedarkan obat-obatan ilegal, antara lain memasukkan obat ilegal dari jalur ilegal di luar negeri melalui jalur logistik tidak resmi. "Selain itu, pengedaran dan pengiklanan obat ilegal secara online, melalui website dengan identitas penjual fiktif," kata Johan.

Menurut dia, tingginya angka temuan obat ilegal yang dijual secara online di Indonesia, diakibatkan sulitnya pengawasan peredaran obat tersebut. Maka, selain menggandeng Bareskrim, Direktorat Bea dan Cukai, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, BPOM juga mengajak Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) untuk melakukan pengawasan barang kiriman serta produk lainnya hingga mencapai Rp56 miliar.

Johan mengungkapkan modus pelaku mengedarkan obat-obatan ilegal, an-

taranya memasukkan obat ilegal dari jalur ilegal di luar negeri melalui jalur logistik tidak resmi. "Selain itu, pengedaran dan pengiklanan obat ilegal secara online, melalui website dengan identitas penjual fiktif," kata Johan.

Menurut dia, tingginya angka temuan obat ilegal yang dijual secara online di Indonesia, diakibatkan sulitnya pengawasan peredaran obat tersebut. Maka, selain menggandeng Bareskrim, Direktorat Bea dan Cukai, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, BPOM juga mengajak Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) untuk melakukan pengawasan barang kiriman serta produk lainnya hingga mencapai Rp56 miliar.

Johan mengungkapkan modus pelaku mengedarkan obat-obatan ilegal, an-

Bentuk Posko Atasi Peredaran Obat Keras

MATARAM (TERBITTOP) — Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, akan membentuk posko terpadu di sejumlah wilayah yang terindikasi menjadi titik peredaran obat keras daftar G, terutama di lingkungan Gomong Lama, Kecamatan Selaparang.

"Posko terpadu ini nantinya akan beranggotakan dari berbagai unsur aparat keamanan, termasuk lingkungan, kelurahan, tokoh agama dan tokoh masyarakat," kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh

di Mataram, Minggu. Pernyataan itu dikemukakan Wali Kota menyikapi terungkapnya peredaran ilegal obat keras daftar G di lingkungan Gomong Lama dengan tertangkapnya beberapa penjual obat keras saat razia yang dilakukan jajaran Polres Mataram pada 24 Agustus 2016.

Wali Kota mengatakan, sebelum posko tim terpadu ini terbentuk, pihaknya menginstruksikan aparat keamanan yakni dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), bersama

pihak-pihak terkait melakukan patroli atau operasi secara menyeluruh untuk mengantisipasi penyebaran penyakit masyarakat. "Patroli tidak hanya untuk di wilayah Gomong Lama, akan tetapi operasi harus dilakukan secara menyeluruh pada titik-titik yang terindikasi menjadi tempat peredaran obat keras termasuk minuman keras dan lainnya," ujarnya.

Wali Kota mengakui, dengan penanggulangan pelaku pengedar obat keras itu, pemerintah kota

kalah cepat mengatasi masalah tersebut. "Ini menjadi bagian dari kelemahan kita, karenanya masalah ini harus kita sikapi serius dengan mengambil tindakan konkret dan proposional," kata Wali Kota.

Di sisi lain, pemerintah kota memberikan dukungan penuh terhadap program yang dicanangkan Kepala Lingkungan Gomong Lama yang telah mendeklarasikan perang terhadap peredaran ilegal obat keras daftar G di lingkungan tersebut pada Kamis (1/9). (ant)

DPR: BPOM Perlu Diperkuat



Saleh Partaonau Daulay

dan makanan palsu beredar," kata Saleh melalui pesan singkat diterima di Jakarta, Kamis.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, dari sisi kelembagaan dan sumber daya manusia, BPOM perlu diperkuat. Saat ini penyidik BPOM hanya sekitar 520 orang. Jumlah yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan luas cakupan pengawasan.

Dari sisi regulasi, Saleh menilai BPOM juga belum memiliki payung hukum yang kuat. Payung hukum BPOM baru peraturan berupa peraturan presiden, yaitu Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondipartemen. "Tidak jarang, kewenangan yang dimiliki BPOM dalam peraturan itu justru dibatasi oleh undang-undang lain," ujarnya.

Dari sisi penganggaran, Saleh berpendapat, BPOM juga belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Tugas dan tanggung jawab besar yang diemban BPOM terlihat belum didukung anggaran yang memadai.

"Akibatnya, program dan kegiatan BPOM terkesan hanya pengulangan dari program yang sama pada tahun sebelumnya," katanya. (ant)

Sahil dan Amalia Bujang dan Dayang Belitung Timur 2016

MANGGAR (TERBITTOP) — Bupati Belitung Timur Yuslih Iha menyerahkan tongkat dalam penobatan Bujang Dayang Kabupaten Belitung Timur 2016 pada malam grand final pemilihan Bujang Dayang Kabupaten Belitung Timur yang berlangsung di venue kawasan Pantai Nyiur Melambai Manggar Belitung Timur, belum lama ini.

Sahil Dukhul Mubarak dinobatkan sebagai Bujang Belitim 2016, dan Amalia Nur Ihsanti dikukuhkan pemegang tongkat Dayang Belitim 2016.

Sahil dan Amalia menyisihkan sembilan pasangan lainnya dan dinobatkan sebagai Duta Pariwisata Belitung Timur 2016 itu. Keduanya tidak menyangka terpilih menjadi Bujang Dayang Belitung Timur 2016.

Sahil dan Amalia melenggang ke babak final Bujang Dayang Belitim 2016 bersama Giovanni Dwintara dan Shabrina. Namun, tongkat Bujang Dayang Belitim 2016 akhirnya diserahkan kepada Sahil dan Amalia oleh Bujang Dayang Belitim 2015 Denny dan Zeba



BUJANG BELTIM 2016 — Sahil Dukhul Mubarak dan Amalia Nur Ihsanti menerima tongkat usai dinobatkan sebagai Bujang dan Dayang Belitim 2016 pada pemilihan Bujang Dayang Belitim 2016 di kawasan Pantai Nyiur Melambai, Kecamatan Manggar, Belitung Timur, belum lama ini.

Marchelda. Adapun, Giovanni Dwintara dan Sabrina Leonita masing-masing dinobatkan sebagai runner up Bujang Dayang Belitim 2016. (eko)

Sport Center Watubelah Banyak Parkir Ilegal

CIREBON (TERBITTOP) — Pengelolaan parkir di kawasan pembangunan Sport Center Watubelah ternyata ilegal. Hal itu diungkapkan Kasi Terminal dan Parkir Dishub Kabupaten Cirebon, Tatang Kosasih. Pihaknya belum menerima pengajuan pengelolaan parkir di kawasan Sport Center.

Bahkan, dia juga belum menerbitkan surat izin pemuangan parkir di kawasan tersebut. Sehingga praktis, pengelolaan parkir di kawasan itu ilegal alias tidak resmi. "Sejauh ini, belum ada pengajuan parkir di sana, berarti itu parkir ilegal," kata Tatang. Diteruskan oleh Tatang,

pengelolaan parkir itu tidak berkontribusi kepada kas daerah. Karena sampai saat ini pengelolaan Sport Center Watubelah masih belum jelas. Karena kawasan itu masih dalam proses pembangunan. Tatang juga menyebut bahwa besaran retribusi parkir sudah ditetapkan dalam Perda Rp1.000.

"Kalau di sana ditarik Rp2.000, itu berarti bukan dari kami, dan tidak ada izin dari Dishub," sebut Tatang.

Kawasan pembangunan Sport Center Watubelah semakin banyak warga, terutama muda-mudi. Mereka mengunjungi kawasan itu hingga berfoto selfie ria di area

Sport Center. Kondisi ini dikawatirkan banyak pihak bakal merusak bangunan Sport Center. Benar saja, di sejumlah titik bangunan sudah terdapat banyak coretan.

Untuk memasuki Sport Center itu, pengunjung masuk melalui pintu samping sebelah utara. Jalan masuknya hanya cukup untuk satu motor. Para pengunjung pun dikenakan tarif parkir hingga Rp 2.000/kendaraan yang ditarik karang taruna setempat. "Dibuka tiap hari Sabtu-Minggu lebih ramai mas, biasanya ramai saat sore," kata salah seorang petugas parkir yang enggan disebutkan namanya. (dj)



CNN INDONESIA

HEWAN KURBAN

Pada saat menyambut Hari Raya IdulAdha penjual hewan kurban musiman ini memanfaatkan trotoar jalan untuk menjual berbagai macam hewan kurban seperti sapi, kerbau, kambing dan domba.

Perkara MRT Berkembang, Gubernur DKI Belum Bayar Tanah Warga

JAKARTA (TERBIT TOP) — Gugatan baru akan didaftarkan lagi terhadap Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya, terkait pembangunan MRT (Mass Rapid Trans), Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Demikian dikemukakan pengacara senior Hartono Tanuwidjaja SH, MSI, dalam wawancara dengan TERBITTOP, pekan lalu, terkait perkembangan perkara gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), sejumlah kliennya terhadap Gubernur DKI, karena hingga kini para tergugat, belum membayar tanah para penggugat yang terkena jalur proyek MRT.

Pada gugatan pertama yang tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan, para penggugat terdiri dari: H Muchtar bin Mugaen, Heriyanto Theng, Ny Rasmee Mahesh Lalimalani, Ny Wienarsih Waloeoyo, Ir Sigit Buntoro dan Dheeraj Mohan Aswain, mengajukan gugatan terhadap jajaran Pemda DKI Jakarta senilai Rp415 miliar melalui, pengacara Hartono Tanuwidjaja, pada PN Jaksel. Sedang latar belakang gugatan terjadi, karena para tergugat mencaplok tanah para penggugat terkait pembangunan MRT di sekitar Jl Fatmawati Jayakarta Selatan.

Sejauh ini, menurut Hartono, sidang menjadi tidak lancar karena kuasa tergugat mengajukan eksepsi kompetensi. Karena itu hakim ketua majelis Kris Nugroho SH, MH, meminta para tergugat membuktikan da-

li-dalil eksepsinya. "Akibatnya, kami belum kebagian membuktikan gugatan karena tergugat dkk, harus buktikan dulu eksepsi kompetensinya," kata Hartono.

Adapun tergugat perkara ini, Gubernur DKI Jakarta, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Selatan, Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Administratif Jakarta Selatan, Camat Kemayoran Baru, Camat Kecamatan Cilandak, Lurah Kelurahan Bandara Selatan, Lurah Kelurahan Pulo dan Lurah Kelurahan Cipete Selatan (tergugat I-X.) Selagi proses persidangan, perkara pertama, kuasa hukum penggugat, Har-

tono Tanuwidjaja dkk mendapat dokumen penting. "Para tergugat mengajukan laporan aprieser, dan setelah kami dapat salinan dokumennya kami putuskan akan gugat itu untuk pembatalan atas hasil-hasil tersebut," jelas Hartono.

Ada dua alasan, menurutnya mengapa harus mengajukan perkara PMH kedua terhadap para tergugat yang sama, yaitu, pertama hasil aprieser itu baru draf. Kedua, tujuannya adalah dibuat penilaian aset itu untuk menjadi dasar musyawarah pembebasan tanah. "Kalau dasar musyawarah itu bukan berarti dia (para tergugat), harus menentukan harga secara global pada wilayah Jakarta Barat, Utara, Timur, Selatan. Tapi harus

musyawarah bukan penilaian global." Sementara dalam undang-undang, disebutkan pembebasan tanah itu bidang perbidang bukan global begitu.

Dalam perkara ini tiba-tiba ada undangan kemudian ada putusan penetapan harga tanah. Mengacu Pasal 27 UU No 12 Tahun 2012, tercantum Pasal 2:2, permasalahan tanah mengacu pada inventarisasi, pemberian ganti rugi, musyawarah. "Ini musyawarah kapan? Tidak ada musyawarah harga tanah diputuskan dan dilampirkan hasil musyawarah yang nota bene tanpa ada satu pun tanda tangan para penggugat. Mana mungkin ada keputusan musyawarah tanpa tandatangan pemilik tanah," tegas Hartono. (dolat munthe)

DPRD Lampung Barat Sahkan Tiga Raperda

LAMPUNG (TERBITTOP) — Blue print legislasi daerah merupakan pedoman dan pengendali penyusunan peraturan daerah yang mengikat lembaga yang berwenang dalam membentuk peraturan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut DPRD Kabupaten Lampung Barat di awal tahun 2016 kembali mengesahkan tiga rancangan peraturan daerah (raperda).

Dikatakan Hi Harun Roni dari Fraksi Gerindra, menurutnya, ketiga perda tersebut di antaranya adalah perda tentang pembentukan dan penyelenggaraan lembaga penyiaran publik lokal Radio Swara Praja FM. Seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat yang berkembang, maka Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Swara Praja di maksudkan untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan dan hiburan yang independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Sementara, menurutnya, terkait Perda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2016-2031 merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat penting bagi suatu daerah. Untuk memberikan payung hukum dan kebijakan nasional ditentang pariwisata, telah ditetapkan UU No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata

dan Peraturan Pemerintah no 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.

Jika berkecuali ke sejumlah daerah wisata lain, secara nyata dunia kepariwisataan telah menggerakkan ekonomi masyarakat, memberikan lapangan pekerjaan yang sangat besar, dan mendorong masyarakat untuk menjaga dan melestarikan budaya. Mulai dari sektor jasa akomodasi hotel, restoran/tumah makan/katering, transportasi (taksi, rental), pengrajin, pedagang oleh-oleh khas, pramuwisata dan lain-lain.

Sedangkan untuk Perda Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan produk hukum daerah, termasuk dalam penyusunan peraturan daerah, maka materi muatan dalam rancangan peraturan daerah ini haruslah lengkap dan rigid. Hal ini dikarenakan raperda ini nantinya akan menjadi pedoman baik dari aspek substansi, kewenangan, maupun aspek prosedur penyusunan peraturan daerah.

Melalui Badan Pembuat Perda (BPP) DPRD setempat, BPP berharap agar nantinya setelah ditetapkan menjadi perda, ketiga raperda tersebut dapat benar-benar dilaksanakan secara optimal oleh seluruh stakeholder terkait, dan tidak terlepas dari pengawasan pihak eksekutif itu sendiri. (agus salim)

Jalan Cikande Banten Banyak Berlubang

PANDEGLANG (TERBITTOP) — Pembangunan yang merupakan sudah kewajiban bagi Kepala Desa Sinarjaya, Kecamatan Mandala Wangi, Kabupaten Pandeglang, Banten.

"Kami membannggun ini didanai dari dana desa (DD) sehingga kami dengan dana ini membangun berupa rabat beton di Kampung Cihanja, Cimeong 1, Cimeong 2, dan vapping blog di Kampung Ciporokoi girang. Serta TPT di Kampung Cimeong 1 dan Cimeong 2 sehingga pembangunan ini sebanyak enam titik," ujar Kepala Desa Sinarjaya Holid.

Lanjut Holid, pembangunan ini atas permintaan warga masyarakat di beberapa kampung kondisi jalan sudah sangat memprihatinkan. "Jadi kami memperhatikan terutama jalan, mck,

serta program yang diwakanakan oleh Bupati Pandeglang, seperti tempat pembuangan sampah, rumah pintar, taman bacaan, posyandu, serta vapping blog," ujar Holid singkat.

Menurut tokoh masyarakat ini, pihaknya sudah lama mengharapakan jalan ini di bangun, namun baru ini kami selaku tokoh masyarakat baru kepala desa ini yang membangun seperti diharapkan oleh masyarakat baru terkabul, maklum belum lama desa kami mengadakan pemilihan kepala desa, baru Kepala Desa Sinarjaya Holid yang memperhatikan tentang pembangunan.

"Memang selama ini kami sebagai masyarakat dengan penuh harapan agar di mana kampung kami dibangun," ujarnya. (anwar)

Kejari Depok Musnahkan Barang Bukti Senilai Rp5 Miliar

DEPOK (TERBITTOP) — Kejaksaaan Negeri (Kejari) Kota Depok memusnahkan sejumlah barang bukti narkoba, obat keras, senjata api hingga uang palsu dengan nilai mencapai Rp5 miliar lebih di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Jl Boulevard Depok, Kamis.

Narkotika yang dimusnahkan itu tercatat jenis ganja seberat 98,175 kilogram, shabu seberat 1,04 kilogram, psikotropika jenis *riclona* sebanyak sembilan strip berisikan 89 tablet dan psikotropika jenis *alprazolam* sebanyak 99 tablet.

Kepala Kejari Kota Depok Yudha Purnawan Sudijanto mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil rampasan dari pelaku tindak pidana pada perkara sepanjang tahun 2015 hingga 2016 yang keseluruhan hamoir mencapai 1000 perkara. Selain itu obat keras jenis tramadol kapsul sebanyak 14 strip dengan jumlah 139 kapsul, obat keras jenis tramadol HCL sebanyak 164 strip dengan jumlah 1.639 tablet, jenis THP sebanyak 65 strip berisikan 649 tablet, jenis Otto, sebanyak delapan potongan strip berisikan sembilan tablet dan *hexymer trihexyphenidyl* sebanyak 1.541 tablet.

Sejumlah barang bukti lain yang dimusnahkan yakni, 57 pucuk senjata api, baik asli, mainan dan air softgun dengan ratusan butir peluru. Alat hisap sabu (bong) 21 buah, serta uang palsu berbagai pecahan yakni pecahan Rp100.000 sebanyak 3.700 lembar, pecahan Rp50.000 sebanyak 600 lembar, pecahan Rp20.000 sebanyak 1.456 lembar dan uang palsu pecahan dolar sebanyak 794 lembar serta 10 timbangan dalam dus dimusnahkan.

"Barang bukti yang kami musnahkan sekarang merupakan hasil dari 1.000 perkara yang sudah diputus pengadilan dan sudah



PEMUSNAHAN BARANG BUKTI — Kepala Kejaksaan Negeri Depok Yudha Purnawan Sudijanto SH MH sedang menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan pemusnahan sejumlah barang bukti narkoba, obat keras, senjata api hingga uang palsu dengan nilai mencapai Rp5 miliar lebih di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Jl Boulevard Depok, belum lama ini. Narkotika yang dimusnahkan itu tercatat jenis ganja seberat 98,175 kilogram, shabu seberat 1,04 kilogram, psikotropika jenis *riclona* sebanyak sembilan strip berisikan 89 tablet dan psikotropika jenis *alprazolam* sebanyak 99 tablet.

mempunyai kekuatan hukum tetap," kata Yudha.

Untuk barang bukti senjata api pihaknya melimpahkan ke Polda Metro Jaya. Dilimpahkan ke Polda karena kami tidak punya alat pemusnah senjata api, namun berita acara pemusnahan kami akan minta ke Polda Metro Jaya.

Sedangkan barang bukti perkara lain berupa kendaraan roda dua pihaknya juga sudah melakukan pelelangan. Terakhir ada 29

unit kendaraan yang kami lelang, dan uang hasil lelangnya diserahkan ke negara.

Yudha menambahkan, barang bukti narkoba menjadi kekhawatiran pihaknya. Kejahatan kasus narkoba di Depok cukup tinggi. Sebanyak 70 persen perkara yang kami bawa ke pengadilan itu umumnya kasus narkoba dan yang paling banyak jenis sabu.

"Ini menandakan Depok sudah darurat narkoba. Untuk itu perlu

penanganan yang lebih serius lagi," katanya.

Proses pembakaran disaksikan pejabat Kejari Jakpus antara lain, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Benny Hermanto SH, Kasi Intel Wahyudi SH serta unsur muspida yang mewakili Wali Kota, Asisten Tata Praja Bidang Pemerintah Drs Sri Utomo, Direktur Pengawasan Senjata Api Polda Metro Jaya Kumpul Wagiman serta Kapolres dan Dandim setempat. (haris)

Tersangka Pencuri Sapi Tewas Dibakar Warga

BATURAJA (TERBITTOP) — Tersangka pencuri hewan ternak yang identitasnya belum diketahui tewas dibakar warga, karena kedapatan mencuri sapi milik warga Desa Ibul Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir berbatasan dengan Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Menurut keterangan Usman, salah satu warga setempat di Desa Mitra Kencana Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Rabu bahwa tersangka tewas dibakar warga se-

telah kedapatan tengah mencuri sapi milik warga Desa Ibul berbatasan dengan Desa Mitra Kencana OKU.

Menurutnya, warga dari dua desa yang bertetangga itu kesal dengan aksi pelaku sehingga membakar tubuh pelaku hingga nyaris seluruh tubuhnya hangus.

Kapolres OKU AKBP Leo Andi Gunawan melalui Kapolsek Peninjauan AKP Rachmad Haji saat dikonfirmasi membenarkan adanya mayat lelaki yang belum diketahui identitasnya dengan kondisi sudah hangus terbakar. (ant)

Barang Haram Sekitar Rp43 M Dimusnahkan Kejari Jakpus

JAKARTA (TERBIT TOP) — Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus), memusnahkan barang haram berbagai jenis narkotika senilai Rp43 miliar di areal Peusijek, Tangerang, Jumat lalu.

Narkotika yang dimusnahkan ini tercatat, 23 kg sabu, heroin sebanyak 558,01 gram, ganja 18.880,63 gram, pil ekstasi 2.258 butir, pil kecapetan 372 butir, telepon selular satu dus berikut timbangan elektrik satu dus.

Berbagai jenis narkotika yang dimusnahkan ini dipasar gelap, nilainya sekitar Rp43 miliar.

Barang terlarang yang dimusnahkan tersebut, menurut Kepala Kejari Jakpus H Hermanto, merupakan barang bukti tindak pidana yang ditangani Kejari Jakpus selama periode Januari 2015 hingga Februari 2016 dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Pemusnahan ini merupakan langkah dari Kejari Jakarta Pusat untuk ikut memerangi kejahatan narkoba," kata Kajari.

"Barang bukti yang kami musnahkan sekarang merupakan hasil dari 1.155 perkara yang sudah diputus pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap," sambung Hermanto.

Barang haram tersebut dibakar menggunakan incenerator bersuhu 5.000 derajat Celcius.

Proses pembakaran berlangsung sekitar satu jam disaksikan pejabat Kejari Jakpus antara lain, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Agus Setiadi, wakil dari Pengadilan Negeri Jakpus, Dinas Kesehatan Tangerang serta aparat Polsek Cisauk. (dolat munthe)

PT Timah Tebar 'Fish Shelter' di Teluk Limau

BANGKA BARAT (TERBITTOP) — Perseoran Terbatas Timah (Persero) Tbk menebar puluhan 'fish shelter' atau tempat perlindungan ikan di perairan Teluk Limau Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, untuk merehabilitasi dan melestarikan lingkungan laut di daerah itu.

"Pembangunan bijih timah laut ini harus diiringi kegiatan rehabilitasi laut," kata Kepala K3 dan Lingkungan Hidup PT Timah (Persero) Tbk, Sadina Surya saat penebaran 60 unit 'fish shelter' di perairan Teluk Limau, Selasa.

Sadina menjelaskan, penebaran 'fish shelter' ini merupakan salah sa-

tu upaya PT Timah untuk mengembalikan kelestarian dan biota laut, sehingga dapat bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya nelayan.

"Kami menepatkan puluhan 'fish shelter' di beberapa titik yang nantinya dapat menjadi tempat bermukim dan berkembangbiak ikan, terumbu karang, sehingga akan memudahkan nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapan ikan," ujarnya.

Sadina mengatakan, penebaran 'fish shelter' akan terus dipantau guna mengetahui dan memastikan pertumbuhan terumbu karang serta

gerombolan ikan yang datang di tempat buatan perlindungan biota laut itu.

"Pemantauan tidak hanya dilakukan di perairan Teluk Limau, tetapi juga tempat-tempat penebaran 'fish shelter' yang ditebar di seluruh perairan Pulau Bangka," ujarnya.

Menurut dia berdasarkan pemantauan 'fish shelter' tersebar perairan Bangka Utara, Bangka Timur, Bangka Selatan dan Bangka Barat berjalan sukses, karena pertumbuhan terumbu karang baik dan gerombolan ikan berkumpul di titik-titik penebaran 'fish shelter' tersebut.

"Sebagian 'fish shelter' ini sudah

bermanfaat bagi nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan ikannya," ujarnya.

Ia berharap masyarakat khususnya nelayan mendukung dan menjaga 'fish shelter' yang telah ditebar, agar tempat berlindung ikan buatan ini berfungsi dengan baik untuk meningkatkan pertumbuhan terumbu karang dan perkembangbiakan ikan.

"Kami terus berupaya merehabilitasi dan melestarikan kembali lingkungan laut di kawasan penambangan kapal isap, agar dampak dari penambangan ini tidak merugikan masyarakat pesisir," ujarnya. (ant)

PERBAIKAN CANDI BOROBUDUR

Sedikitnya 22 pekerja dikerahkan untuk memasang lempengan timah di langkan dua sisi barat Candi Borobudur. Pemasangan ini rutin dilakukan agar air hujan langsung jatuh di lantai, bukan mengalir melalui sela-sela dinding candi tersebut.



SINDO

Warga Ancam Bongkar Pipa PDAM

Laporan: Titik Sulaksana dan Sudirdja

CIREBON (TERBITTOP) — Kisruh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Cirebon dengan warga Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, terkait mata air, belum menemukan titik terang. Bahkan, warga mengancam untuk membongkar PDAM jika tidak menemukan solusi.



Sunjaya Purwadisastra

Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra mengaku angkat tangan. Sunjaya menyerahkan masalah tersebut langsung kepada PDAM. Namun Sunjaya menilai, masyarakat Desa Cikalahang tidak mengetahui kepentingan-kepentingan yang lebih besar.

Karena kepentingan PDAM untuk seluruh warga Kabupaten Cirebon.

Menurut Sunjaya, yang ditonjolkan warga Cikalahang justru egosentrismenya. Baik pribadi maupun secara kelompok. "Kalau kita bicara secara luas, semua masyarakat Kabupaten Ci-

rebon harus terlayani, tidak hanya warga Desa Cikalahang saja," singkatnya.

Warga Blok 2 Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, mengancam bakal membongkar paksa pipa milik PDAM. Karena pipa PDAM melintang di atas tanah warga seluas lima ribu

meter persegi.

Bagaimana tanggapan PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon? "Saya *no comment* dulu untuk urusan ini," kata Direktur PDAM Kabupaten Cirebon, Suharyadi, saat dikonfirmasi.

Seperti diketahui, kisruh sumber mata air di Desa Cikalahang, Kecamatan Du-

kuputang, terus berlanjut. Warga belum mau memaafkan PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

Kepala Dusun Blok 2 Desa Cikalahang, Imam Prayogi mengatakan, selama ini warga sudah cukup baik hati dengan PDAM. Tapi, PDAM tidak punya ikhtidak baik dengan masyarakat.

"Percuma dilakukan pertemuan jika ketika PDAM tidak memiliki solusi. Kalau, terus-terusan seperti ini, terpaksa kita akan bongkar paksa pipa PDAM yang melintang di atas lahan warga," tegas Imam.

Dia menyesalkan pernyataan direksi PDAM yang mengaku rugi Rp29 juta per

hari setelah penutupan sumber mata air di Cikalahang. "Kalau bicara rugi, sama saja PDAM ngajak perang dengan kami. Ingat, sudah 38 tahun kami dirugikan. Tidak izin kepada pemilik lahan, juga tidak ada kontribusinya. Itu artinya tidak ada ikhtidak baik," paparnya. (***)

Air Mampet Bayar Harus Lancar

CIREBON (TERBITTOP) — Masalah pelayanan air menuai sorotan dari pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Cirebon. Penyebabnya, sudah dua hari pasokan air dari PDAM tak lancar. "Ini bukan sekali dua kali. Entah sudah berapa kali kami mengeluhkan soal air," ujar salah satu warga yang namanya tidak mau disebutkan.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan masak, dia terpaksa menggunakan air galon. Pasalnya, aliran air PDAM tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kalau ada aliran air, debitnya terlalu kecil dan butuh waktu lama untuk menampungnya. "Nyuci dan mandi kan butuh banyak air. Kalau nyalannya kecil repot juga," ungkapnya.

Hal senada diungkapkan warga lainnya, Jarkoni (33). Jarkoni mengaku tidak mengetahui penyebab distribusi air tidak lancar belakangan ini. Dirinya hanya berharap

PDAM segera melakukan perbaikan bila ada kerusakan pipa atau faktor lain yang menyebabkan aliran air terganggu. "Kita berharap pihak PDAM dapat segera mengatasi persoalan-persoalan seperti ini. Air merupakan kebutuhan dasar bagi kita untuk kehidupan sehari-hari," harapnya.

Gangguan aliran air PDAM juga meluas. Di Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, warga mengeluhkan lambatnya respons petugas PDAM dalam menindaklanjuti laporan. Aliran air sepekan terakhir tersendat, nyaris tanpa penanganan. "Kita kalau bayar sangat tepat, tapi giliran mampet dan kita laporan ternyata tidak ditangani," tutur Sudirja (34), warga Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk.

Tak hanya penanganan laporan, kata Sudirja, warga juga mengeluhkan minimnya informasi dari PDAM. Mestinya ketika ada gang-

guan ada sosialisasi yang disampaikan sehingga warga bisa melakukan antisipasi. Fadli berharap, PDAM meniru yang dilakukan petugas PT PLN yang berkeliling menggunakan pengeras suara dan menyebarkan surat bila ada pemadaman maupun perawatan.

"Ini nggak ada informasi sama sekali, kita jadi bertanya-tanya dan bingung. Kok jadi sering mampet ini kenapa?" tanya dia. Sebelumnya, saat dikonfirmasi atas keluhan warga, Direktur Utama PDAM Sofyan Satari mengakui, ada laju penambahan pelanggan yang membuat kebutuhan air masyarakat juga naik signifikan. Sampai saat ini, setidaknya ada lebih dari tiga ribu sambungan baru. Padahal, sistem yang digunakan PDAM belum diperbaharui. "Sistem baru itu seharusnya sudah selesai di tahun 2000. Tapi baru 2016 kita melakukan penyesuaian, karena tahun 1998 dan 1999 kita ada krisis moneter dan itu berpengaruh



Sofyan Satari

juga ke PDAM," tuturnya. Keterlambatan selama 16 tahun ini, kata Sofyan, menyebabkan pelayanan PDAM kepada 59.268 rumah tangga kurang maksimal. Apalagi, dalam tiga tahun terakhir terjadi kenaikan sambungan hingga 3.150 rumah tangga. Kondisi ini tidak mampu ditanggulangi karena berdasarkan Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) hanya 1.061 liter/detik. Sehingga untuk daerah yang terpadat, tertinggi dan terjauh, aliran air belum mampu mencapai 24 jam sehari. "Terpadat seperti Samadikun. Perumnas dan wilayah Kecamatan Harjamukti itu tertinggi. Klayar terjauh," terangnya. (***)



AGUS SALIM

DENGAR PENJELASAN — Bupati Lampung Barat sedang serius mendengarkan penjelasan dari insinyur kopi di Vietnam bersama satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), kelompok tani dan petani kopi Lampung Barat, belum lama ini.

Bicara Kopi, Ingat Lampung Barat

LAMPUNG (TERBITTOP) — Kabupaten Lampung Barat menjadi salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Provinsi Lampung, tidak heran ketika berbicara kopi, tentunya identik dengan Liwa, karena selain memiliki kualitas yang baik, produk olahan kopi bubuk asal Lampung Barat memiliki cita rasa tersendiri yang menjadi pembeda dengan kopi dari daerah lain di Indonesia. Kopi bubuk olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga di Lampung Barat terbagi dalam beberapa varian, mulai dari kopi organik hingga kopi Luwak pengolahannya menjadikan hewan musang sebagai media fermentasi.

Dikatakan Surahman SH selaku kabag Humas Lampung Barat, kualitas dan mutu kopi robusta asal Lampung Barat telah mendapatkan Sertifikasi Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2014 dengan nama "Kopi Robusta Lampung" bersama dua kabupaten lainnya di Provinsi Lampung. Selain itu melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 46/Kpts/PD.300/1/2015 tanggal 16

Januari 2016, tentang kawasan perkebunan nasional, Kabupaten Lampung Barat ditetapkan menjadi salah satu kawasan perkebunan nasional.

Mengacu pada data dinas perkebunan Lampung Barat, dijelaskan oleh Kadis Perkebunan Rusdi (45), sebanyak 35.737 KK merupakan petani kopi yang tergabung pada 995 kelompok tani. Dari jumlah itu sebanyak 355 kelompok tani telah bermitra dengan perusahaan ekspor kopi, dengan tingkat produktivitas kopi rata-rata 1.050 kg/ha. Kemudian dari keseluruhan areal perkebunan di Lampung Barat mencapai 65.125 ha, tercatat sebanyak 53.606 ha atau sekitar 82 persen merupakan areal perkebunan kopi robusta.

Bahkan sejauh ini terdapat lima perusahaan ekspor yang telah menjalin kemitraan dengan petani kopi beberapa kecamatan di Lampung Barat. Kelima perusahaan dimaksud antara lain PT Nestle yang bermitra dengan 89 kelompok tani pada delapan kecamatan, PT Indocafco yang membina 176 kelompok tani pada sembilan kecamatan, PT Louis Dreyfus yang membina 34 ke-

lompok pada dua kecamatan, dan PT Nedcoffe dengan sembilan kelompok binaan pada dua kecamatan serta PT Lampung Robusta Coffee dengan 47 kelompok tani binaan di dua kecamatan.

Belajar dari Vietnam

Dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil kopi, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus melakukan berbagai terobosan, salah satunya dengan melakukan studi pembelajaran dari negara maju. Belum lama ini Bupati Lampung Barat bersama beberapa kepala satuan kerja, perwakilan kelompok tani, perwakilan pedagang dan tenaga penyuluh melakukan studi pembelajaran tentang budidaya dan pengelolaan areal perkebunan kopi ke negara Vietnam.

Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri mengatakan, ada hal yang perlu dicontoh dari negara maju seperti Vietnam dalam melakukan budidaya tanaman kopi, seperti dalam satu hektar, hanya ditanam sekitar 1.500 batang kopi, sementara di Lampung Barat masih berkisar 3.000 batang. "Dalam satu batang bisa

menghabiskan 4 kg pupuk kimia dan 10 kg pupuk organik, kalau di Lampung Barat, masih sangat minim," kata Mukhlis Basri, belum lama ini.

Menurut Mukhlis Basri, pola tanam dan perawatan serta pemupukan teratur yang dilakukan petani Vietnam terbukti menjadikan hasil panen lebih maksimal, di mana dalam satu hektar rata-rata mencapai empat ton, sementara di Lampung Barat rata-rata satu ton. "Kalau tingkat kesuburan tanah, di Lampung Barat jauh lebih bagus, maka senga kami membawa petani, penyuluh dan pedagang pengepul supaya melihat langsung," papar Mukhlis.

Sejauh ini, lanjut Mukhlis, upaya meningkatkan produksi dan produktivitas kopi di Lampung Barat dilakukan dengan peremajaan kopi, intensifikasi lahan, konservasi lahan dan antisipasi anomali iklim, penyediaan bibit unggul, bantuan alsintan dan penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP). Kemudian pemberdayaan dan penguatan kelembagaan kelompok tani melalui pelatihan dan pendampingan, hingga membangun kemitraan dengan perusahaan eksportir kopi. (agus salim)

Desa Nameng Adakan Pelatihan Kader PKK

LEBAK (TERBITTOP) — Pelatihan Kader Desa Wisma yang diselenggarakan oleh Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak di Desa Nameng dengan dihadiri 33 rukun tetangga serta diikuti oleh ibu-ibu PKK Desa Nameng, Kecamatan Rangkasbitung, Lebak.

Pelatihan ini diselenggarakan dengan tujuan agar seluruh kader PKK se Desa Nameng bisa memberikan penyuluhan tentang kesehatan, keterampilan serta kemandirian dalam pelayanan terhadap warga masyarakat khususnya Desa Nameng," ujar Kepala Desa Nameng H Hasan.

Lanjut H Hasan, kalau semua kader bisa menerapkan apa yang didapat saat pelatihan ini terutama dalam kehidupan keseharian, saya yakin Desa Nameng

bisa maju terutama dalam bermasyarakat, satu sama lainnya, sebab kalau terus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan membuat keterampilan, seperti kerajinan tangan, pembuatan kerajinan yang bisa dilakukan oleh PKK Desa Nameng, jadi dengan pelatihan ini kami berharap kepada PKK Desa Nameng apa yang didapat dalam pelatihan ini bisa dimanfaatkan. Begitu juga, kata Ketua PKK Desa Nameng Neng Juhaeni, dalam pelatihan ini dengan tujuan agar seluruh kader PKK Desa Nameng terutama agar ibu-ibu rukun tetangga bisa memanfaatkan apa yang diajarkan oleh Ibu Camat, serta apa yang didapat dari pelatihan ini agar bisa berguna serta dimanfaatkan di lingkungan masing-masing. (anwar/gunawan)

Kepala SMA 6 Kota Depok Terancam Dipolisikan

DEPOK (TERBITTOP) — Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Depok Tugino SPd, terancam akan dipolisikan, terkait dengan adanya dugaan mendapatkan suap dari orang tua siswa puluhan juta rupiah. Hal itu diungkapkan oleh salah seorang anggota Komite Sekolah Kota Depok Muhammad Incang yang ditemui *TERBITTOP*, Rabu (7/9) lalu, di Kantor Wali Kota Depok, Jawa Barat.

Menurut Incang, ada sekitar 46 siswa yang di bawah oleh guru sekolah termasuk di dalamnya Kepala SMAN 6 Depok, kononnya siswa tersebut tidak masuk sekolah dengan alasan sudah penuh ruangan. Sehingga siswa tersebut masih mencari sekolah swasta yang mau menerimanya, karena selain sudah terlambat juga siswa yang sudah masuk selama kurang lebih dua bulan lamanya, saat ini sudah siap untuk mengikuti semester pertama.

Incang menambahkan, bahwa dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melaporkan kasus PPDB kepada pihak yang berwajib. "Pasalnya terkait dugaan suap yang diterima oleh guru dan kepala sekolah se Kota Depok, yang sampai saat ini, belum ada titik temunya," ujar Incang.

Wali Kota Depok Moham-



Mohammad Idris

mad Idris menyatakan, kalau ada orang tua yang merasa ditipu oleh calo, maka harap melaporkan kepada pihak kepolisian, untuk diproses lebih lanjut. "Selain itu saya sampaikan bahwa selama pengumuman urutan jurnal, dan sudah di tentukan siswa SMA/SMK negeri yang diterima, maka selanjutnya tidak ada lagi penerimaan siswa baru untuk SMA/SMK negeri di Depok," kata Wali Kota.

Muhammad Idris menambahkan, kepada orang tua siswa, agar segera mencari SMA/SMK swasta. Karena tidak ada lain pilihan selain sekolah swasta. "Saya juga bersekolah di swasta, dan sekarang jadi wali kota Depok, tidak perlu mengejar dengan cara apa pun agar anaknya masuk SMA/SMK negeri," tandasnya. (zis)

**DIPADATI
PENGUNJUNG**
Kawasan Monumen
Nasional (Monas)
Jakarta ramai dipadati
pengunjung saat libur
panjang Idul Adha,
Minggu (11/9).

ANTARA

SINGKAT

**Dukcapil Bangka Rekam
E-KTP di Rumah Warga**

SUNGAILIAT (TERBITTOP) — Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memberikan pelayanan perekaman data kependudukan ke rumah warga bagi wajib E-KTP yang menderita sakit lumpuh atau usia 80 tahun ke atas. "Kami memberikan kemudahan pelayanan perekaman data kependudukan langsung ke rumah warga wajib E-KTP yang menderita sakit lumpuh atau yang usia 80 tahun ke atas," kata pejabat Dukcapil Kabupaten Bangka, Agus di Sungailiat, Kamis. Menurutnya, ditingkatkannya pelayanan perekaman data kependudukan bagi warga setempat bertujuan agar akses perekaman data wajib E-KTP terjangkau secara keseluruhan. (ant)

**118 BUMN Ramaikan
IBDExpo 2016**

JAKARTA (TERBITTOP) — Sebanyak 118 BUMN dan sejumlah BUMD mengambil bagian dalam Indonesia Business & Development (IBDExpo) 2016, pameran yang bertujuan menunjukkan perkembangan kinerja, inovasi dan peran perusahaan milik negara dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Pameran yang berlangsung 8-10 September 2016 itu dibuka langsung oleh Wapres Jusuf Kalla, di Jakarta Convention Center, Kamis yang didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno dan dihadiri para direksi dan komisaris BUMN, pengusaha dan para investor. Ajang tahunan tersebut digarap oleh empat BUMN tergabung dalam klaster "National Publishing and News Corporation" yaitu Perum LKBN Antara, PT Balai Pustaka, Perum PNRI dan Perum PFN. (nt)

**Pajak Daerah Sumsel
Bertambah Rp400 Miliar**

PALEMBANG (TERBITTOP) — Anggaran pendapatan dan belanja daerah Sumatera Selatan pada tahun ini bertambah Rp500 miliar dan dari jumlah tersebut pajak daerah bertambah hampir Rp400 miliar. Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumatera Selatan Agus Sutikno menyampaikan hal itu saat ditanya mengenai pendapatan daerah di Palembang, Kamis. Menurut dia, di dalam tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD Sumsel sudah diputuskan, karena uji secara teknis Komisi III DPRD Sumatera Selatan menugui ke dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) provinsi setempat seberapa besar peluang pencapaian target tersebut. (nt)

**Raperda APBD
Lambar Digodok**

LAMPUNG (TERBITTOP) — DPRD Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menggelar rapat kerja komisi bersama mitra kerja di ruang kerja komisi I, II dan ruang sidang Margahasana berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016. Rapat komisi dilaksanakan secara maraton yang sebelumnya telah dilaksanakan pidato pengantar nota keuangan atas rancangan APBD Lambar oleh Bupati Drs Hi Muklis Basri MM dilanjutkan pemandangan umum fraksi-fraksi oleh enam fraksi DPRD.

Kemudian, jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi pada Rabu (31/8) dan dilanjutkan dengan hearing bersama mitra kerja masing-masing komisi, Kamis (1/9). Hearing tersebut guna membahas progres anggaran yang telah diperuntukkan untuk masyarakat atau menggali Pendapat Asli Daerah (PAD) Lambar.

Seperti halnya yang diungkapkan Ulul Azmi Solitiansyah SH, salah seorang juru bicara komisi II, pihaknya mengatakan, cara perhitungan pembayaran balih

yang terpampang di beberapa titik di Lambar, karena menurutnya pemasangan balih harus sesuai dengan peraturan daerah (Perda).

"Kotrak untuk balih pun jelas ada," jelas politisi PPP tersebut.

Jika kontrak balih telah habis segera diturunkan sebab akan menyalahi aturan perda yang berlaku, jangan sampai lari dari perda dan dirinya juga menjeaskan adanya balih yang terpampang tidak beraturan karena hal itu akan mempengaruhi indahny Kabupaten Lambar.

Menanggapi hal tersebut, Kepala PPKD Sudarto menjelaskan, target keseluruhan Rp46 juta dan persatu meter Rp58.500 dan untuk kontrak dilakukan pertahun Rp42.200. Kemudian, untuk pemasangan minimal satu meter per-segi namun jika ada yang kurang dari satu meter akan dianggap satu meter karena menurut dia, meskipun spek sudah dilaksanakan dengan benar tetapi tetap saja akan ada kekurangan.

Untuk pemasangan meskipun hanya satu hari akan dianggap satu minggu. "Kita akan tetap anggap pemasangan satu minggu walaupun hanya satu hari," terangnya. (agus salim)

Warga Panggarangan Demo DPRD Lebak

Laporan: Gunawan

LEBAK (TERBITTOP) — Puluhan warga Desa Mekarjaya, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, melakukan aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPRD Kabupaten Lebak, Kamis (8/9). Kedatangan pendemo menuntut Bupati Lebak Hj Iti Oktavia Jayabaya membatalkan penggusuran lahan masyarakat untuk proyek pembangunan ruas jalan Cimampang-Cigudeg (batas Bogor).

Pendemo menilai Bupati Lebak telah bertindak sewenang-wenang dengan kekuasaannya telah menge-

luarkan surat perintah yang mengharuskan masyarakat memberikan lahannya untuk pembangunan jalan sa-

rat kepentingan PT Cemindo Gemilang perusahaan raksasa yang memproduksi semen Merah Putih.

Menurut pendemo, Bupati Lebak telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan tidak memperhatikan Perpres No 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum.

Pendemo meminta Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak segera mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan aktivitas alat berat yang melakukan penggusuran lahan untuk pelebaran pembangunan jalan Cimampang-Cigudeg. Selain itu, DPRD juga agar mengkaji surat edaran Bupati Lebak No 921/472-adpemb/2016 tertanggal 29 Agustus 2016 yang dinilai upaya merampas hak masyarakat.

"Sebagai warga negara yang taat hukum maka kami menginginkan setiap kebijakan yang di ambil dalam hal ini mengacu pada

aturan yang ada agar tidak terkesan bahwa kebijakan yang di ambil menguntungkan segelintir orang dan merugikan masyarakat banyak," ujar korlap aksi Deris Kuntring.

Menurut Deris di akhir orasinya, jika selama yang menjadi tuntutan atas hak masyarakat tidak terpenuhi maka kami akan terus menempuh upaya hukum, dan akan melakukan aksi besar-besaran dalam mencari keadilan.

"Kami akan terus berjuang melakukan upaya hukum dan lainnya selama yang menjadi tuntutan kami tidak terpenuhi," tandasnya. (***)



DEMO TOLAK AHOK

Massa yang tergabung dalam Front Wong Cilik Berbicara berunjuk rasa di depan markas DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu (7/9), mendesak PDIP tak mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai capug Jakarta 2017-2022 dan memilih Tri Rismaharini.

Renovasi Pasar Lipat Kajang Manggar Mangkrak

MANGGAR (TERBITTOP) — Dua kali gagal lelang mengakibatkan rencana Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk merenovasi Pasar Lipat Kajang Manggar kembali mangkrak. Rencana yang sebelumnya akan dilakukan pada Juli, hingga saat ini belum terlaksana. Padahal pemindahan atau relokasi pedagang Pasar Lipat Kajang sudah dilaksanakan jauh hari sebelum. Pedagang pasar relokasi sementara ke pasar Desa Mekar Jaya, Juni lalu.

Keterangan yang dihimpun TERBITTOP, masyarakat menyalahkan ketelodoran pemerintah setempat dalam rencana renovasi pasar ini yang terkesan pejabat Pemkab Belitung Timur saling menyalahkan.

"Renovasi pasar saja berlarut larut apalagi yang lainnya," cetur Budi, warga Manggar kepada wartawan.

Menurut warga tersebut, gagalnya renovasi itu sedikit banyak memberi dampak bagi perekonomian di Kota Manggar.

Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Belitung Timur Talafudin sempat menjelaskan bahwa pembangunan renopasi pasar terse-

but gagal dikarenakan gagal lelang bahkan sudah dua kali gagal lelang yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Beltim.

"Insya Allah, mudah-mudahan tahun ini bisa dilaksanakan kegiatan renopasi tersebut," ungkap Talafudin.

Sementara itu Wakil Bupati Beltim Drs Burhanuddin usai pertemuan gelar pendapat antara pedagang, LSM dan instansi terkait, sambil geleng kepala menyatakan, melihat kondisi saat ini, serta kita tidak punya pos anggaran daerah, saya tidak bisa menjamin untuk dapat terlaksananya renovasi pasar. "Tindak lanjut jika memang pedagang harus dipindah kembali ke pasar lama, kita lakukan rapat khusus mengenai itu. Semua pihak terkait kami panggil," kata Burhanuddin.

Gagalnya kegiatan pembangunan pasar menjadikan kegiatan ekonomi masyarakat tidak saja melemah. Karena tidak ada aktivitas apa pun yang dilakukan di bangunan kosong bekas pasar tersebut. Selain itu bangunan tersebut jika malam hari hanya menjadi tempat tongkrongan remaja. (eko)



Drs Burhanuddin

Anggaran Dana Desa Dongkrak Kesejahteraan Masyarakat

LEBAK (TERBITTOP) — Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPPD) Kabupaten Lebak optimis penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD) yang dikucurkan pemerintah dapat mendorong kesejahteraan masyarakat pedesaan. Tahun 2016 ini pencairan ADD untuk Kabupaten Lebak sebesar Rp334 miliar, terdiri dari pemerintah pusat sebesar Rp215 miliar dan APBD Lebak Rp119 miliar.

"Anggaran Dana Desa dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur di desa tersebut," ujar Rusito, kepala BPMPPD Kabupaten Lebak kepada awak media di kantornya.

Menurut Rusito, hingga kini realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) untuk pembangunan infrastruktur telah ada yang mencapai 50 persen, bahkan sudah ada yang 100 persen. Dengan adanya pengalokasian ADD, tentunya kehidupan masyarakat pedesaan sangat terbantu, karena dapat mendorong roda pembangunan di Kabupaten Lebak.

Masih menurut Rusito, penggunaan ADD tersebut selain pembangunan infrastruktur juga padat karya.

"Saya yakin Anggaran Dana Desa itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dana itu bergulir di desa," ujarnya. Ditambahkannya, kebanyakan penggunaan ADD itu diperuntukkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, tembok penahan tebing, air bersih, membangun kantor desa juga membentuk BUMDes. "Kami minta pembangunan infrastruktur itu juga diawasi oleh masyarakat setempat guna menghindari penyelewengan anggaran," pintanya. (gun)

Sinergitas Pemkot dan Pengusaha Wujudkan Pembangunan Daerah

CIREBON (TERBITTOP) — Menuju Kota Cirebon yang lebih baik ke depan, Pemerintah Kota Cirebon berniat membangun sinergitas dengan para pelaku usaha di Kota Cirebon. Selain terkenal sebagai kota wali, Kota Cirebon juga dikenal dengan sebutan kota perdagangan dan jasa akan fokus membangun ekonomi di segala bidang perdagangan dan jasa.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, Pemkot Cirebon akan mengoptimalkan dua event besar untuk mempromosikan Kota Cirebon di tingkat nasional dan internasional. Kedua event tersebut yak-

ni penyelenggaraan PON dan HUT Kota Cirebon.

Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis mengatakan, sinergitas dengan para pengusaha ini sebagai wujud tanggung jawab mereka membangun daerah karena mengembangkan usahanya di Kota Cirebon. Pembangunan daerah jika hanya mengandalkan pemerintah kota saja tidak akan cukup, mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas.

"Pembangunan daerah tidak bisa terwujud jika hanya mengandalkan pemkot, karena APBD tidak mencukupi kalau dipakai untuk perbaikan di semua

bidang," katanya saat memberikan sambutan pertemuan dengan para pengusaha di ruang Adipura Balai kota.

Menurutnya, jika dunia pariwisata dan usaha meningkat maka dampaknya bisa mengembangkan perekonomian masyarakat. Bahkan, dengan tegas Azis mengatakan, jika ada SKPD yang terbukti mempersulit mengeluarkan izin usaha dan melancarkan pengembangannya, maka hal tersebut segera dilaporkan kepadanya. Upaya peningkatan perekonomian Kota Cirebon, Azis memberikan keleluasaan bagi pengusaha untuk melancarkan usaha. Akan tetapi, bukan berar-

ti pendirian dan pengembangan usaha di Kota Cirebon boleh tanpa seizin dari pemerintah. "Dengan ekonomi Pemerintah Kota Cirebon yang baik, maka akan banyak tenaga kerja dari lokal yang bisa terserap, dan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.

Sementara Asda Administrasi Umum Setda Kota Cirebon Vicky Suryana menjelaskan, sinergitas antara pemkot dengan para pengusaha tersebut adalah paradigma baru bagi pemkot untuk keluar dari kotak permasalahan yang selama ini terjadi.

Atas dasar itu, pemkot melihat tidak

terkesan bahwa kebijakan yang di ambil menguntungkan segelintir orang dan merugikan masyarakat banyak," ujar korlap aksi Deris Kuntring.

Hal yang perlu dilakukan adalah komunikasi dengan para pelaku usaha lebih intensif lagi demi meningkatkan perekonomian. Saya berharap partisipasi publik untuk meningkatkan ekonomi daerah bisa lebih baik lagi," ujar Vicky. (ts)

RONALDO KALAHKAN MESSI di Game Populer FIFA 17

BARCELONA (TERBITTOP) — Perdebatan kembali muncul soal siapa yang paling hebat antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Suporter sepak bola terpecah soal ini. Biasanya, masing-masing memiliki argumen untuk mendukung opini mereka. Hal ini sering membuat developer game sepak bola seperti FIFA, PES atau Football Manager, bingung dalam menentukan pilihan.

Untuk musim 2016-2017 kali ini, salah satu game paling populer, FIFA 17 memilih Ronaldo sebagai yang terbaik. Ronaldo memiliki nilai tertinggi dunia dengan 94 poin, sementara Messi satu poin di bawahnya.

Messi lebih bagus dari Ronaldo dalam hal passing dan dribbling. Sementara itu, Ronaldo lebih bagus dalam aspek kecepatan, tembakan, pertahanan dan kekuatan fisik.

Setelah Ronaldo dan Messi, ada Neymar, Luis Suarez,

Manuel Neuer, Gareth Bale, Zlatan Ibrahimovic, Jerome Boateng, Robert Lewandowski dan David de Gea di posisi 10 besar.

Suporter pun bertanya-tanya, mengapa Messi mendapatkan rating yang lebih rendah dari Cristiano Ronaldo. Menurut laporan yang diturunkan oleh *Sport*, ada alasan di balik hal tersebut, yang ternyata sama

sekali tidak ada hubungannya dengan kualitas teknik Messi di atas lapangan.

Barcelona dan Konami, perusahaan kreator seri game sepakbola PES (Pro

untuk menja-di game sepak bola terbaik dalam beberapa tahun terakhir, maka tidak sulit untuk memahami mengapa

FIFA dan baru tahun ini digantikan oleh Marco Reus. FIFA melihat Messi sebagai sosok pemain yang kini justru akan mengurangi kekuatan merek dagang mereka,



Evolution Soccer), telah meraih kata sepakat dengan Barcelona dan perusahaan Jepang itu kini resmi jadi partner klub Catalan selama tiga tahun mendatang.

Mengingat FIFA dan PES belakangan selalu bersaing

FIFA akhirnya memutuskan untuk 'menghukum' Messi dengan memberikannya rating lebih rendah dari Ronaldo.

Messi sendiri dalam beberapa tahun terakhir tak pernah absen di sampul depan

dan memutuskan untuk membuatnya lebih 'lemah' di dalam game.

Jadi, tak perlu diperdebatkan lagi. Ini lebih karena urusan dagang, bukan faktor di lapangan yang sesungguhnya. (bln)



Sejak kedatangan Zlatan Ibrahimovic (tengah), pendapatan United meningkat.

Pemasukan Manchester United CETAK REKOR RP9,1 TRILIUN

MANCHESTER (TERBITTOP) — Manchester United mencatat rekor pemasukan 515,3 juta poundsterling atau setara dengan Rp9,1 triliun, pada tahun keuangan 2016.

Dengan begitu MU menjadi klub sepakbola Inggris pertama yang mencatat rekor pemasukan di angka tersebut.

Pada tahun ketika meraih Piala FA, Manchester United juga menandatangani kesepakatan 14 sponsor dengan pemasukan komersial, hari pertandingan, dan dari TV yang meningkat.

Diperkirakan pemasukan tahun 2017 akan meningkat menjadi 540 juta poundsterling walau klub Old Trafford tersebut tidak masuk Liga Champions musim ini.

Sejauh ini, di bawah manajer Jose Mourinho, mereka berada di

peringkat tiga klasemen sementara Liga Primer.

Berdasarkan rekening hingga 30 Juni 2016, Manchester United dipastikan menjadi klub pertama di Inggris yang mencapai setengah miliar poundsterling walau masih di bawah Barcelona dengan pemasukan 570 juta poundsterling yang diumumkan bulan Juli.

Selain itu Manchester United juga mencatat laba operasi sebesar 68,9 juta poundsterling, yang juga merupakan rekor di Inggris.

"Kinerja keuangan yang kuat membuat kami mampu untuk melakukan investasi di tim, manajemen, dan sarana untuk menempatkan kami bersaing dan merebut piala-piala di tahun mendatang," kata Wakil Ketua Eksekutif Man United, Ed Woodward. (bbc)



Neymar Mulai BERKARIER DI MUSIK

BARCELONA (TERBITTOP) — Peseepak bola Neymar tidak puas menjadi bintang dunia di lapangan hijau. Neymar optimis bisa memulai karier baru di bidang musik.

Tidak main-main, dan tampaknya akan segera terwujud dalam waktu tak lama lagi.

Melalui akun jejaring sosial miliknya, Neymar mengumumkan rencana terjun ke dunia musik itu. Bahkan, Rabu lalu ia merilis lagu perdananya.

"Saya memulai karier musik saya. Saya merilis lagu pertama saya



di Facebook. Kita semua memiliki Neymusico, bagikan," tulis Neymar di akun Twitter miliknya.

Peseepak bola yang menjadi pemusik, bukan baru. Jose Pinto dan Jese Rodriguez juga telah merilis album mereka masing-masing. Neymar sudah mengikuti kursus piano untuk memuluskan karier di dunia tarik suara. (bln)

Pape Souare Cedera Rahang AKIBAT TABRAKAN MOBIL

LONDON (TERBITTOP) — Bek Crystal Palace, Pape Souare, masuk rumah sakit pada hari Minggu lalu, pasca mengalami kecelakaan mobil. Bek asal Senegal ini mengalami cedera paha dan rahang, dan akan terus mendapat perawatan intensif di rumah sakit.

"Klub bekerja sama dengan rumah sakit untuk penyembuhannya dan jelas kami berharap dia cepat sembuh," demikian pernyataan resmi klub, dilamannya.

Souare diterbangkan dengan helikopter dari lokasi kecelakaan, M4 motorway di daerah Barat London, ke rumah sakit ter-

dekat.

Pernyataan kepolisian setempat mengatakan, "Petugas telepon sebelum 12.10 (sekitar pukul 18.00 WIB) pada hari Minggu, 11 September ada dua mobil yang bertabrakan di antara persimpangan empat dan tiga. Seorang pria berusia 20 tahunan — dibawa ke rumah sakit di London Timur untuk perawatan cedera yang tidak mengancam nyawanya."

Souare yang bergabung dari klub Perancis dari Lille pada tahun 2015, tak tampil ketika Eagles menang 2-1 melawan Middlesbrough namun dia tampil di tiga laga sebelumnya. (ss)



Pape Souare

Paul Pogba Gaet Mantan Gebetan Justin Bieber

MANCHESTER (TERBITTOP) — Dengan status sebagai pesepak bola termahal di dunia pasca digaget Manchester United dari Juventus, tak usah heran jika Paul Pogba digilai banyak wanita.

Satu di antara wanita itu adalah, Chantel Jeffries.

Chantel model seksi asal Inggris yang pernah berkencan dengan penyanyi papan atas dunia, Justin Bieber.

Chantel berada dalam mobil ketika Bieber ditangkap lantaran mengemudi dalam keadaan teler di Miami pada 2014 lalu.

Nah, usai putus dari Bieber, Chantel jadi buah bibir ketika ia kepergok jalan bareng Pogba di Manchester pada Kamis lalu.

Menurut *Daily Mail*, Pogba dan Chantel berjalan dalam hujan rintik. Keduanya diketahui menikmati makan siang di Restoran Wagamama. Chantel mengunggah video di akun Snapchat pribadinya yang memperlihatkan Pogba tengah berdansa. Bukti, kekayaan dan ketenaran memudahkan menggaet wanita. (dm)



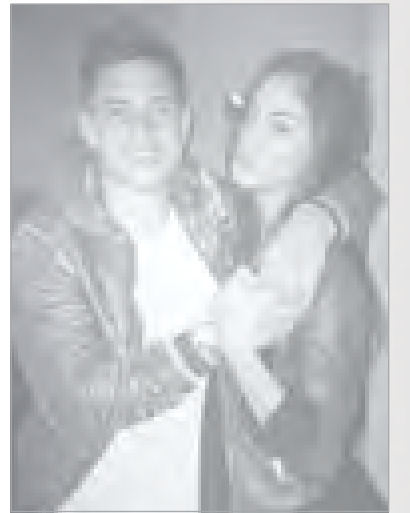
Chantel Jeffries-Paul Pogba

Guadalupe Gonzalez Jadi Kekasih Manuel Iturbe

ROMA (TERBITTOP) — Muncul ke permukaan nama wanita seksi yang menjadi kekasih penyerang AS Roma dan timnas Paraguay Juan Manuel Iturbe. Dia adalah, Guadalupe Gonzalez.

Dengan wajah yang cantik, tubuh ideal dan kelebihan lainnya, telah membawa Guadalupe jadi Miss Paraguay dan mewakili negaranya di ajang Miss Universe 2013.

Guadalupe lahir di Lambare, Paraguay, 29 Februari 1992. Wanita yang berprofesi sebagai model ini lebih tua setahun dari Iturbe. Namun, mereka dinilai sebagai pasangan serasi. (bln)



Manuel Iturbe-Guadalupe

Tuna Netra Kuliah Gratis di Udinus Semarang

SEMARANG (TERBITTOP) — Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang menggratiskan biaya kuliah sampai lulus terhadap penyandang tuna netra yang menginginkan berkuliah di perguruan tinggi tersebut. "Kami gratiskan. Silakan saja kalau ada penyandang tuna netra yang ingin berkuliah di sini," kata Rektor Udinus Edi Noersasongko saat penyambutan mahasiswa baru Udinus di Semarang, Senin lalu.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut sebenarnya sudah dimulai sejak 10 tahun lalu dan sampai sekarang ini telah meluluskan setidaknya delapan mahasiswa penyandang tuna netra tanpa membayar biaya sepeser pun.

Menurut dia, kebijakan itu berawal dari pertemuannya dengan Suryandaru, mantan Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Jawa Tengah yang saat itu menyampaikan keinginannya berkuliah di Udinus. "Suryandaru waktu itu bilang ke saya. 'Pak, apakah saya boleh kuliah?' Saya jawab boleh saja. Setelah saya pikir nanti bagaimana karena kan harus ada fasilitas khusus untuk mereka (tuna netra-red)," katanya.

Namun, Edi mengaku terenyuh melihat semangat Suryandaru meski harus berusaha ekstra keras mengikuti perkuliahan yang ketika itu masih sama seperti mahasiswa yang lainnya dan ternyata berprestasi.

Sekarang ini, kata dia, sudah ada software khusus untuk menerjemahkan teks ke dalam suara untuk memudahkan penyandang tuna netra mengikuti perkuliahan sehingga mereka lebih nyaman dalam berkuliah. "Ada juga dosen yang kami kirim ke Thailand untuk belajar software khusus untuk tuna netra. *Alhamdulillah*, dosen kami juga ada yang berhasil menciptakan penerjemah teks dalam bahasa Indonesia," katanya. (rel)

Trilogi Gelar Seminar Sistem Ekonomi Pancasila

JAKARTA (TERBITTOP) — Universitas Trilogi Jakarta menyelenggarakan acara Lokakarya dan Seminar Sistem Ekonomi Pancasila yang diikuti 40 peserta yang berasal dari para akademisi perguruan tinggi di Indonesia. Acara lokakarya diadakan di Hotel Amaris Jl Raya Pasar Minggu, (Rabu 14/9) sedangkan kegiatan seminar diadakan di auditorium Kampus Universitas Trilogi Jakarta Selatan, Kamis (15/9).

Rektor Universitas Trilogi Prof Dr Ir Asep Saefuddin MSc mengatakan, pelaksanaan Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Sistem Ekonomi Pancasila tersebut terlaksana berkat kerjasama yang baik antara Universitas Trilogi bersama tujuh mitra perguruan tinggi lainnya yang ada di Indonesia.

"Secara keseluruhan acara tersebut dihadiri sekitar 30 sampai 40 peserta yang kebanyakan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia," jelasnya.

Ketujuh perguruan tinggi tersebut masing-masing adalah Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Jenderal Sudirman (Unsoed) Purwokerto, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Bandung, Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta, Universitas Pancasila (UP) Jakarta dan Institut Koperasi Indonesia (Inkopin) Bandung.

Sedangkan tema daripada pelaksanaan acara Seminar dan Lokakarya Sistem Ekonomi Pancasila tersebut adalah "Mewujudkan Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila dalam Kurikulum Pendidikan Nasional". Semiloka tersebut juga dihadiri oleh beberapa perwakilan dari ketujuh perguruan tinggi di Indonesia dan perwakilan dari Universitas Trilogi Jakarta yang kali ini bertindak sebagai tuan rumah.

Sementara itu, dalam pelaksanaan Semiloka penyampaian materi Pengantar yang juga sekaligus sebagai pembicara kunci (keynote speaker), yaitu Dr (HC) Subiako Tjakrawerdya, yang dikenal sebagai mantan Menteri Koperasi Republik Indonesia sekaligus sebagai ketua Yayasan YPII Universitas Trilogi Jakarta.

Kemudian juga dihadiri oleh Prof Dr Ir Asep Saefuddin MSc yang dikenal sebagai rektor Universitas Trilogi Jakarta sekaligus sebagai Guru Besar Statistik di Institut Pertanian Bogor (IPB). Turut hadir Prof Edi Suandi Hamid, sebagai salah pelaku aktif

pemikiran Ekonomi Pancasila dari awal bersama Emil Salim dan almarhum Mubiarto. Edi Suandi Hamid juga menjabat sebagai Senior Advisor Universitas Trilogi Jakarta.

Pada kesempatan itu Subiako Tjakrawerdya saat membuka semiloka mengatakan, kehadiran dan kontribusi pemikiran antara Universitas Trilogi Jakarta bersama tujuh perguruan tinggi lainnya yang berpartisipasi dalam pelaksanaan acara semiloka tersebut akan menjadi momentum bersejarah yang penting bagi bangsa Indonesia, ternyata masih ada perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki komitmen untuk mengkaji, mendalami dan bahkan mengajarkan Sistem Ekonomi Pancasila (SEP).

"Dalam pelaksanaan acara Semiloka akan mengkaji, mendalami dan memberikan masukan terhadap buku Sistem Ekonomi Pancasila yang masih dalam bentuk draf tersebut. Sedangkan masukan dari kalangan akademisi yang hadir dalam semiloka tersebut akan semakin memperkaya dan mempertajam isi atau kandungan dari buku tersebut, sehingga outputnya diharapkan menjadi lebih komprehensif," kata Subiako. (cdn/ris)



MAHASISWA BARU TRILOGI

Prof Dr Haryono Suyono, ketua Dewan Pembina bersama Rektor Universitas Trilogi Prof Dr Ir Asep Saefudin MSc bersama Dr Aam Bastaman, wakil rektor I, dan Ibu Ade, wakil rektor II sebelum Prosesi Penerimaan Mahasiswa Baru 2016/2017 di Auditorium Kampus Trilogi, belum lama ini.

Arcandra Tahar di Seminar Migas Fakultas Teknik UI

Tiga Pilar Bangun Kedaulatan Bangsa

JAKARTA (TERBITTOP) — Selasa lalu Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FT UI) menggelar seminar bertajuk 'Sharing on Research and Invention Experiences in Oil and Gas Sectors'. Hadir sebagai pembicara Arcandra Tahar PhD, pemegang paten teknologi pengeboran lepas pantai (offshore).

Seminar yang dimoderatori oleh Manajer Riset & Pengabdian Masyarakat FTUI Prof Dr Ir Akhmad Herman Yuwono MPhil.Eng ini membahas peran teknologi terbaru dalam bidang *offshore* untuk membangun kedaulatan energi bangsa.

Menurut Arcandra, terdapat tiga pilar yang diperlukan untuk membangun kedaulatan bangsa. Pertama, pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Di Indonesia, sumber daya alam harus digunakan untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Kedua, kedaulatan energi. "Negara harus mampu menjamin ketersediaan energi untuk rakyat dan industri," ujar Arcandra.

Pilar terakhir adalah investasi. Investasi harus diarahkan pada pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya. "Investasi juga harus

mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan kerja sama yang saling menguntungkan, tidak masalah jika dari pihak asing," tutur lulusan Ocean Engineering Universitas Texas A&M ini.

Untuk mencapai kedaulatan di bidang energi, Arcandra melihat adanya potensi untuk memanfaatkan lapangan minyak dan gas marginal (marginal field) di Indonesia dengan teknologi yang tepat. *Marginal field* adalah sebuah lokasi pengeboran minyak yang umurnya pendek (kurang dari lima tahun), dan tidak terlalu menguntungkan secara ekonomi. Di Indonesia, banyak ditemukan di lokasi pengeboran gas yang menjadi *marginal field*, dengan volume cadangan gas di bawah 1.3 Tcf.

Usianya yang tergolong pendek dan cadangan yang sedikit membuat proses pengeboran mi-

gas di wilayah marginal field ini memerlukan teknologi khusus agar lebih ekonomis. Penggunaan alat pengeboran yang dapat dipindah-pindahkan menjadi salah satu solusi. "Satu alat dibangun untuk multiple platform agar lebih hemat. Tidak mungkin pakai alat model *jacket* yang statis di satu tempat," katanya.

Teknologi yang dapat menjadi solusi untuk marginal field ini bernama Multi-column Tension (MCT) yang didesain oleh Arcandra. Alat ini dapat digunakan untuk operasi migas di laut dangkal (< 150 meter), dan dapat dikembangkan untuk dipakai di laut dalam (> 150 m). Strukturnya yang sederhana membuat biaya pembuatannya lebih murah dibanding alat model lain. Proses pemasangannya juga tidak memerlukan crane sehingga MCT dapat dengan mudah dipindahkan ke *marginal field* lain.

Di akhir seminar ini, Arcandra mengingatkan untuk memulai menciptakan teknologi dari hal yang sederhana. "Jangan berpikir bahwa teknologi *offshore* harus canggih agar dapat dioperasikan oleh semua orang di lapangan," tutur Arcandra. (rel)

RSUA Surabaya Model Rumah Sakit Pendidikan

SURABAYA (TERBITTOP) — Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA) Surabaya menjadi model rumah sakit pendidikan bagi perguruan tinggi negeri di Indonesia.

"RS Unair akan dijadikan 'pilot project', sementara hasilnya bisa diaplikasikan ke RS PTN yang lain," kata Direktur RS Unair Prof Nasronuddin SpPD K-PTI FINASIM, di Surabaya, Senin lalu.

Ia mengemukakan hal itu dalam "Focus Group Discussion: Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Pendidikan dalam Menyongsong MEA" yang diselenggarakan oleh Komite Bersama dari Dikti dan Kemenkes.

"Jadi, kita menentukan pola dan model pengelolaannya itu bagaimana. RS Unair sendiri akan dijadikan *pilot project*, sementara hasilnya bisa diaplikasikan bersama



RS Unair

untuk bisa diaplikasikan ke RS PTN yang lain," katanya.

Dalam acara yang juga dihadiri oleh Rektor Unair Prof Dr M Nash SE, MT, Ak, perwakilan Kemenkes Dr Ina Rosalina dr SpA (K) MKes MHKes, dan perwakilan Kemenristek Dikti Ulfiandri SH, MH UI, ia menjelaskan, RS PTN merupakan bagian dari perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

"Karena itu, rumah sakit pendi-

dikan juga menyelenggarakan tiga fungsi utama, yakni penelitian, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Untuk itu, manajemen dari rumah sakit pendidikan perlu menyediakan dosen yang melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap mahasiswa," katanya.

Salah satu hal yang dibahas dalam forum diskusi adalah perihal mengenai status kepegawaian. Menurut Nasron, sumber daya manusia yang bekerja di RS PTN Pendidikan berasal dari Kemenkes dan Kemenristek Dikti.

Oleh karena itu, harus ada persamaan persepsi mengenai status kepegawaian. Di RS Unair sendiri, profesi dokter menangkap menjadi dosen.

Di bidang penelitian, RS Unair juga telah menyelenggarakan beberapa kali riset di Surabaya. (rel)

UNIVERSITAS TRILOGI
Periode 1 October s/d 31 Desember
JALUR PMDK
Penelusuran Minat dan Kemampuan
31 Analisis & 31 Manajemen & 31 Ekonomi & 31 Hukum & 31 Agama & 31 Teknologi
31 Ilmu dan Teknologi Pangan & 31 Desain Komunikasi Visual & 31 Desain Produk
31 Sistem Informasi & 31 Teknik Informatika & 31 Pendidikan Bahasa Inggris
31 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini & 31 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
J.T.M. Bebas Biaya Pendaftaran & Titik
Masuk Tanpa Tes
- Beasiswa 75% SPP & Bebas Uang Gedung 100%
Berkesempatan Mengikuti Program Pre-College Gratis
www.universitas-trilogi.ac.id
JI. TMP Kalibata - Jakarta Selatan 12760

Terbaik di Indonesia, UI Berada di Peringkat 325 Dunia

DEPOK (TERBITTOP) — Universitas Indonesia (UI) menduduki peringkat 325 dunia atau naik 33 poin dari peringkat sebelumnya pada 2015. "UI berhasil mempertahankan posisinya menjadi universitas terbaik di Indonesia selama lima tahun berturut-turut menurut hasil publikasi tahunan QS University Ranking," kata Kepala Humas dan KIP UI, Rifely Dewy Astuti di Depok, Selasa lalu.

Pemeringkatan ini dilakukan oleh Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking 2016/2017 terhadap 916 Perguruan Tinggi di 81 negara di dunia yang dirilis pada Selasa (6/9) melalui situs <http://www.topuniversities.com>.

QS University Ranking merupakan pemeringkatan resmi yang dijadikan acuan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI untuk mengukur kualitas kelembagaan perguruan tinggi di Indonesia menuju World Class University.

Felly mengatakan, pencapaian UI merupakan hasil kerja keras segenap sivitas akademika UI. Tahun 2016, UI menggencarkan pelaksanaan konferensi internasional guna memacu pengembangan budaya riset dan inovasi serta meningkatkan jumlah publikasi jurnal ilmiah internasional. (rel)

Kuliah Umum di Universitas Indonesia

Ridwan Kamil Ajak Mahasiswa Berpikir Kreatif

JAKARTA (TERBITTOP) — Wali Kota Bandung Ridwan Kamil hadir memberikan kuliah umum yang bertema Generasi Kreatif, Generasi Pemimpin Masa Depan di UI, Selasa lalu. Kuliah umum ini diadakan di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Gedung Dekanat, Kampus UI Depok.

Dalam kuliah umumnya, Ridwan Kamil mengajak mahasiswa untuk mempunyai nilai kreatif untuk menghasilkan solusi dalam menghadapi tantangan hidup. "Teori ekonomi tidak selalu dilampirkan di ruangan AC, tapi teori harus dieksperimen di lapangan dan melahirkan sebuah gagasan atau ide," tambahnya.

Ia juga menambahkan bahwa kreativitas ini diperlukan ketika kita menjadi seorang pemimpin dan harus menghasilkan solusi dari masalah-masalah yang menghampiri.

Salah satu solusi berbasis kreativitas ini adalah program kredit melati yang ia gagas di Bandung.

"Kredit melati merupakan kredit tanpa agunan dengan suku bunga berkisar 7-8 persen. Program ini sudah berjalan setahun dan berhasil mengatasi permasalahan ekonomi di kalangan masyarakat menengah ke bawah," jelasnya.

Program ini lahir terinspirasi dari program Grameen Bank Muhammad Yunus di Bangladesh, de-

ngan sedikit modifikasi yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Bandung.

Dengan adanya program ini, masyarakat punya alternatif tempat meminjam selain lintah darat atau bank yang mencairkan dana dengan bunga tinggi hingga 15 persen.

Selain memberikan materi kuliah umum, Ridwan Kamil juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan UI terkait pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Kerja sama ini meliputi praktik kerja lapangan atau magang para peserta didik di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bandung dan



Ridwan Kamil

partisipasi dalam percepatan perbaikan iklim bisnis daerah dan daya saing mikro, kecil dan menengah di Kota Bandung.

Rektor Universitas Indonesia, Muhammad Anis, berharap kerja sama ini dalam jangka panjang dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia, yang sebagian besar memang terdiri dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. (rel)

'Waspadai Penyebaran Virus Zika'

Di Singapura Zika Tinggi

JAKARTA (TERBITTOP) — Pemerintah sudah memprioritaskan langkah mengantisipasi masuknya wabah virus Zika ke Indonesia. Upaya antisipasi diutamakan berlaku di Kota Batam, DKI Jakarta, Medan dan Bali yang kerap menjadi tujuan pelancong asal Singapura dan Malaysia.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan antisipasi masuknya virus Zika ke Indonesia akan dilakukan di seluruh pelabuhan dan bandara internasional. Namun, prioritas diberikan di empat gerbang utama Indonesia. Pencegahan dilakukan melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

"Pintu masuk banyak sekali. Saya meminta betul kepada masyarakat, karena nyamuk ini di mana-mana ada, tolong jaga lingkungan," ujar Nila di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, pekan lalu.

Walau antisipasi masuknya virus Zika ke Indonesia sudah dicarikan, penanganan penumpang asal Singapura di beberapa bandara diketahui belum maksimal sampai saat ini. Bukti, *thermo scanner* yang berfungsi untuk mengukur suhu badan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, hanya berada di Terminal kedatangan 2E. Alat serupa di Terminal kedatangan 2D tidak bisa mendeteksi suhu badan penumpang. Padahal, menurut informasi yang diberikan pihak Manajemen Terminal 2 bandara tersebut, penumpang asal Singapura mayoritas mendarat di Terminal kedatangan 2D.

Kemudian, keberadaan spanduk mengenai bahaya wabah virus Zika juga hanya ada di Terminal kedatangan 2E. Sementara di

Terminal kedatangan 2D, yang terlihat justru spanduk peringatan wabah virus Mers CoV.

Nila mengakui kekurangan yang masih ada di beberapa pintu masuk penumpang di bandara. Ia berjanji akan memperbaiki sistem pencegahan masuknya virus Zika di berbagai pelabuhan dan bandara internasional.

"Saya akui bahwa beberapa *scanner* belum berjalan dengan baik. Tapi kami terus membantu agar ada, terutama di daerah-daerah yang terdata untuk mobilisasi pendatang dari Singapura," katanya.

Kementerian Kesehatan, melalui KKP, akan melakukan pemeriksaan dan perawatan khusus bagi penumpang yang terdeteksi demam dan memiliki ruam di badannya. Jika seorang penumpang menderita demam, petugas KKP akan mengecek terlebih dahulu darah orang tersebut di laboratorium. Setelah pemeriksaan darah dilakukan, Kemkes akan memberi kartu kewaspadaan bagi penumpang yang terbukti positif terkena virus Zika.

Kasus Zika mendadak muncul di hadapan masyarakat Indonesia setelah Senin (29/8) lalu pihak Dinas Kesehatan Singapura mengonfirmasi adanya 41 kasus virus Zika di negara tersebut. Status tersebut membuat Indonesia makin siaga. Terlebih, setelah beredar informasi yang menyatakan bahwa satu warga negara Indonesia di Singa-



ANTISIPASI VIRUS ZIKA — Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menginstruksikan peningkatan antisipasi masuknya virus Zika ke Indonesia.

pura terkena virus Zika.

Penyebaran

Pada awal tahun 2016, The Eijkman Institute for Molecular Biology atau Lembaga Biologi Molekuler Eijkman menyampaikan hasil temuannya yang cukup mengejutkan. Lembaga itu telah mendapati satu kasus Zika di Sumatera dan memperkirakan bahwa virus itu tampaknya telah menyebar 'untuk sementara waktu' di Indonesia.

Virus yang ditularkan oleh gigi-

tan nyamuk ini telah menimbulkan kekhawatiran di sebagian benua Amerika. Virus yang memiliki gejala mirip dengan demam berdarah ini diyakini menyebabkan *microcephaly*, yakni bayi lahir dengan ukuran kepala dan otak yang kecil atau abnormal.

Lembaga Biologi Molekuler Eijkman mengatakan bahwa seorang laki-laki berusia 27 tahun yang tinggal di Provinsi Jambi dan tidak pernah bepergian ke luar negeri, diketahui telah positif mengidap virus Zika, pada awal semester 2015. Ins-

titut itu menemukan kasus tersebut ketika mempelajari wabah demam berdarah di Jambi.

Tim peneliti menyisihkan contoh (spesimen) yang menyebabkan gejala-gejala demam berdarah seperti demam dan ruam, yang setelah diuji ternyata bukan merupakan virus demam berdarah. Penelitian lebih lanjut pun dilakukan.

Deputi Direktur Eijkman Institute Dr Herawati Sudoyo PhD menyebutkan dari 103 spesimen yang diperiksa dan terbukti negatif demam berdarah, pihaknya men-

datapi satu yang positif Zika. Temuan ini cukup mengejutkan mengingat virus ini biasanya menjadi endemik kawasan Afrika dan area Pasifik. Virus ini terbilang jarang muncul di kawasan Asia Tenggara. Namun, kini hal itu terbantahkan dengan fakta bahwa virus Zika memang benar-benar telah menyebar di kawasan Asia Tenggara. Kenyataan tersebut tentu membuat masyarakat Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan agar tidak ada warga yang terinfeksi virus itu. (ant)

Eep Saefullah:

Kata Siapa Ahok Tak Bisa Dikalahkan?

JAKARTA (TERBITTOP) — Pengamat politik, Eep Saefullah Fatah menegaskan, tidak benar jika calon incumbent Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu tak bisa dikalahkan di Pemilihan Gubernur DKI 2017 mendatang. Ada beberapa kriteria yang diusung pesaing Ahok yang bisa membuat cagub incumbent kalah.



Eep Saefullah Fatah

news.com dalam Muza-karah tokoh ulama dan tokoh nasional di Jakarta,

Rabu (14/9).

Kedua, pemimpin daerah yang terbukti kinerjanya, seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani, sedang birokrat tak termasuk. "Ketiga, pemimpin harus tegas dan berwibawa. Tapi tidak asal ngomong dan bahasanya juga santun," tuturnya.

Sementara itu, dalam musyawarah tersebut, ada tujuh nama yang akan diajukan untuk dipilih. Namun, dari ketujuh nama itu, tiga nama tampak lebih dominan di kalangan warga Jakarta selama ini, seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani, Sandiaga Uno dan Yusril Isha Mahendra. (nt)

Reklamasi Pulau G Akan Dilanjutkan

JAKARTA (TERBITTOP) — Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sepakat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kembali melanjutkan pembangunan reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta yang sebelumnya sempat tertunda.

Menurut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk memberhentikan reklamasi pulau. Dia menuruti tidak ada aspek yang dinilai patut menjadi alasan diberhentikannya pembangunan pulau.

"Tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan. Semua aspek sudah dideklarasi dari mulai lingkungan hidup, proyek strategis PLN, kelautan, perhubungan dan Pemprov DKI," ujar Luhut

seperti dilansir *CNNIndonesia* sesuai menghadiri rapat di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (14/9) malam.

Luhut menyatakan aspek-aspek teknis khususnya soal lingkungan hidup Pulau G, secara bertahap diselesaikan. Menurutnya, aspek lingkungan hidup menjadi tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK) untuk mengawasi pengembang kedepannya.

Luhut juga menegaskan, aspek masyarakat nelayan menjadi perhatian utama dalam keberlanjutan proyek ini. Dia menegaskan masyarakat pesisir Teluk Jakarta dipastikan mendapatkan hak yang lebih baik. "Para nelayan harus mendapat yang lebih baik dari sekarang, itu perintah untuk Gubernur yang harus

ditindaklanjuti," kata Luhut.

Dalam kesempatan sama, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan pemerintah provinsi sudah mempersiapkan peta tematik untuk membangun tanggul dan rumah susun bagi para nelayan Teluk Jakarta.

Pembangunan tanggul dan rumah susun, kata Ahok, akan dibangun di sepanjang Teluk Jakarta.

Ahok menyatakan, unit-unit rusun rencananya akan dibangun untuk mengakomodir sekitar 20.000 warga. Unit-unit rusun akan disewakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan subsidi. "Kami beri subsidi untuk sewa rusun. 80 persen subsidi. (Biaya sewa) Rp 5.000 sampai Rp15 ribu per hari," kata Ahok. (cnn)

'TUNTUT JESSICA SESUAI FAKTA'

(dari halaman 1)

Jessica selama ini tidak benar. "Selama ini kan selalu dikatakan, 'kalau bukan Jessica ya siapa lagi?' Saya selalu bilang, 'Jangan begitu dong, tanya dulu apakah ada sianida'," kata Otto.

Dia mengatakan, fakta baru terungkap dari kesaksian ahli patologi forensik. "Kita buktikan, sianida sungguh ternyata tidak ada, jadi kalau sianida tidak ada, ya sudahlah mau apalagi kita cerita," pungkasnya.

Jaksa Penuntut Umum Ardito Muwardi mengatakan, masih memang kesaksian pakar patologi forensik asal Australia, Beng Beng Ong, dalam persidangan Jessica Kumala Wongso pada Senin pekan lalu. "Nanti akan kami nilai dalam tuntutan. Hakim pun masih belum ada keputusan seperti apa," ucap Ardito.

Beng Beng Ong menjadi saksi ahli meringankan untuk Jessica dalam perkara pembunuhan terhadap Wayan Mirna Sailihin. Dosen senior di Universitas Queensland itu hendak pulang ke negaranya, akhirnya dideportasi karena pelanggaran visa kunjungan.

Saat bersaksi, Beng Beng Ong menyatakan penyebab kematian Mirna bukan karena diracunkan sianida, seperti yang selama ini dituduhkan. Jessica didakwa sebagai pelaku pembunuhan berencana terhadap Mirna, yang tewas setelah meminum es kopi Vietnam di Kafe Olivier, Grand Indonesia. Jessica menjadi terdakwa kasus tersebut. Jaksa penuntut memberikan dakwaan tunggal terhadap Jessica, yakni Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan Berencana.

Dalam setiap persidangan, selalu ada masyarakat yang datang ke ruang sidang untuk menyaksikan langsung jalannya persidangan. Mereka mengaku penasar setelah menonton sidang yang selalu disiarkan secara langsung oleh stasiun-stasiun televisi.

Perkara ini menjadi sebuah pembelajaran buat masyarakat. Ketika jaksa berani mempersangkakan seseorang, harus punya bukti yang kuat, terlepas Jessica salah benar (karena) kan pengadilan yang menentukan. Jika bukti itu tidak kuat maka jaksa juga harus berani menuntut bebas dan pengadilan demikian juga membebaskan yang tidak bersalah. Sebaliknya, jika nanti dari sidang perkara itu terbukti kuat, maka pengadilan harus menghukum terdakwa. (berbagai sumber/ris)

DIHUJAT BERTUBI-TUBI, MARSHANDA MEMILIH DIAM

(dari halaman 1)

hasil diagnosa dokter. Ketika itulah, Egy John berpikir untuk mengakhiri hubungan.

Belakangan, Egy John mengetahui kalau Marshanda menjalin hubungan dengan JS, peserta Abang None Jakarta.

Lalu, apa reaksi Marshanda atas hujatan yang bertubi-tubi itu? Mantan kekasihnya tersebut hanyalah mendapat kabar tidak benar.

"Saya hanya mau berikan satu statemen saja ya. *Eggak* perlu

ditanggapi karena di dalamnya banyak info-info yang tidak sesuai dengan kenyataan. Saya *enggak* mau membuat ini semakin terkesan menjadi sensasi," tulis Marshanda dalam sebuah pesan singkat. (bin)

BASRI PENGGANTI SANTOSO ITU AKHIRNYA MENYERAH

(dari halaman 1)

Tidak ada perlawanan, dan kemudian diketahui laki-laki itu bernama Basri," tambah Boy Rafli.

Basri yang dikenal sebagai pemimpin baru MIT, setelah pendiriannya, Santoso, tewas dalam penggerebekan beberapa waktu lalu.

"Basri kemudian mengakui, rekannya Andhika alias Hilal, hanuyut, ketika hendak menyebe-

rang dan terbawa arus deras Sungai Puna," tambah Boy.

Mayat Andhika —yang juga merupakan salah satu buronan anggota kelompok Santoso— sudah ditemukan polisi sekitar setengah jam sebelumnya. Disebutkan, dalam peristiwa itu, ditangkap juga istri Basri, Nurmi Usman alias Oma.

Sepeninggal Santoso, Basri alias Bagong, adalah tokoh yang paling senior di kelompok itu.

"Dia termasuk yang hebat. Pernah berhasil lari dari LP Ambana tahun 2007. Itulah letak kehebatannya," papar Boy Rafli. Kapolri Tito Karnavian menyebut, penangkapan ini makin melemahkan kelompok Santoso. (bbc)

'PEMERINTAH DAN DPR BERSIKAP TIDAK CERDAS'

(dari halaman 1)

pembangkangan terhadap hukum positif dan karena itu Ahok dianggap tidak konsisten. DPR tidak boleh menilai Ahok sebagai melakukan pembangkangan terhadap hukum positif tentang cuti petahana, karena Ahok tidak berada dalam posisi tidak cuti dalam masa kampanye atau melanggar ketentuan cuti kampanye, karena memang belum tiba masa kampanyenya.

Begitu juga DPR dan pemerintah tidak boleh menilai Ahok sebagai tidak konsisten menghadapi ketentuan soal cuti petahana saat kampanye, hanya karena Ahok pernah meminta Foke harus cuti saat kampanye pada Pilkada 2012, karena antara meminta Foke harus cuti saat kampanye sebagai sikap mengingatkan seseorang untuk taat hukum, berbeda dengan sikap Ahok melakukan koreksi terhadap pasal-pasal UU melalui uji materil ke MK yang dinilai sebagai merugikan hak konstitusional seseorang sekaligus juga dalam rangka memenuhi ketentuan UU MK, sehingga hal itu jelas merupakan dua hal yang

sangat berbeda.

Dua sikap Ahok di atas, benar secara hukum, benar secara strategi politik dan benar pula secara prosedural dalam posisi sebagai calon gubernur atau sebagai orang yang mencalonkan diri untuk melakukan dua hal yang dipersoalkan secara pokok bumbuh oleh wakil DPR dan wakil pemerintah di MK, karena dua sikap Ahok yang dipersoalkan itu sesungguhnya adalah dalam rangka Ahok menjalankan undang-undang.

Perbuatan Ahok mengingatkan Foke harus cuti saat kampanye juga menjadi kewajiban moral bagi Ahok untuk mengingatkan Foke, karena memang hukum positifnya mengatur demikian. Begitu pula dengan perbuatan mengugut pasal-pasal sebuah undang-undang karena dinilai sebagai telah atau akan merugikan hak konstitusional seseorang juga menjalankan amanat UU Mahkamah Konstitusi.

Aspirasi Indonesia sangat menyayangkan sikap ambigu, tidak kritis bahkan terkesan sebagai pokrol bambu dari wakil DPR dan

pemerintah di DPR yang menilai langkah konstitusional Ahok menguji UU sebagai langkah tidak etis dan sikap tidak konsisten, padahal dalam yang hampir bersamaan seorang Setya Novanto, anggota DPR-RI, mantan ketua DPR-RI dan ketua Fraksi Golkar yang juga anggota Komisi III DPR-RI, melakukan tindakan yang sama dengan apa yang dilakukan Ahok yaitu upaya uji konstitusionalitas UU Tipikor dan UU ITE kepada MK, di mana Setya Novanto sendiri sejak awal proses legislasi dimulai hingga pengesahan UU Tipikor dan UU ITE, ikut mengetuk palu sahnya kedua UU itu, namun ketika Setya Novanto menguji konstitusionalitas kedua UU itu, DPR dan pemerintah malah bersikap membusu, bahkan DPR dan pemerintah seolah-olah mendukung hingga Setya Novanto memenangkan gugatan itu. Inilah yang namanya sikap ambigu, bermuka dua yang melahirkan diskriminasi.

(Penulis adalah Jubir Aspirasi Indonesia & Koordinator IPDI, Penasihat Hukum TERBITTOP)

MARY JANE DI TENGAH PEMBICARAAN DUA PRESIDEN

(dari halaman 1)

Maka, ketika Mary Jane diperbincangkan keduanya, tentu menarik. Soalnya Mary Jane yang tertangkap di Bandara Adisutjipna, Yogyakarta pada April 2010 karena membawa 2,6 kilogram bubuk heroin, telah dijatuhi hukuman mati oleh PN Yogyakarta pada Oktober tahun itu.

Upaya hukumnya mulai dari banding, kasasi, peninjauan kembali, hingga permohonan grasi kepada Presiden Jokowi telah di-

tolak. Namun eksekusi terhadap Mary Jane ditunda, atas permintaan presiden Filipina ketika itu, Benigno Aquino dan ditangkapnya dua warganegara Filipina Maria Kristina Sergio dan pasangannya Julius Lacanilao, yang menyatakan Mary Jane hanya korban dari perdagangan manusia yang mereka lakukan.

Saat kunjungan kerja di Serang, Banten, dalam rangkaian Peringatan Idul Adha pada Senin

lalu, Jokowi mengatakan Duterte sudah mempersilakan eksekusi hukuman mati terhadap Mary Jane. Di lain pihak, Jokowi menghormati proses hukum yang tengah berlangsung di Filipina.

Sementara, Jaksa Agung HM Prasetyo meminta otoritas Filipina untuk segera menyelesaikan proses hukum Mary Jane terkait kasus perdagangan manusia, agar eksekusi mati segera dilaksanakan. (end)



90 Hari Setelah Ditetapkan

Status WNI Arcandra Rawan Digugat

SETELAH mendapatkan status kewarganegaraan dan ditetapkan sebagai warga negara Indonesia (WNI), status Arcandra masih bisa berbuntut panjang. Penetapan tersebut berpotensi digugat di pengadilan. Lantaran, dasar penetapan kembali Arcandra itu dinilai lemah.

Salah satu pertimbangan penetapan kembali Arcandra sebagai WNI adalah karena kekhawatiran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pria tersebut tidak memiliki kewarganegaraan (stateless). Menkumham Yasonna Laoly pun takut diseret ke muka hukum karena lalai tidak memberikan status kewarganegaraan pada seseorang. Maka, dia pun menggunakan prinsip *non-apatrie stateless* sebagai dasar tetap menyematkan status WNI pada Arcandra.

Pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai, pemberian status WNI karena *stateless* itu diperuntukkan bagi orang yang belum punya kewarganegaraan se-

belumnya. Bukan untuk orang yang telah punya kewarganegaraan lantas dicabut. "Ada yang tak sambung," kata Mahfud.

Dia menjelaskan, *stateless* itu misalnya bila ada anak warga Amerika yang lahir di Indonesia. Amerika menganut asas *Ius Soli* atau diakui sebagai warga Amerika hanya ketika lahir di negeri Paman Sam itu. Oleh karena itu, anak warga Amerika yang lahir di Indonesia itu diberi status kewarganegaraan Indonesia. Karena khawatir anak itu tidak memiliki kewarganegaraan alias *stateless*. "Kalau sudah punya warga negara lantas dicabut beda lagi prosedurnya," ujar Mahfud.

Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah telah mengukuhkan Arcan-

dra Tahar sebagai warga negara Indonesia sejak awal September lalu. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu kini hanya memiliki satu status kewarganegaraan yakni, warga negara Indonesia (WNI). "Demikian asas perlindungan maksimum, dan tidak boleh *stateless* kami keluarkan surat keputusan penetapan namanya (Arcandra) jadi warga negara Indonesia sejak 1 September," kata Yasonna.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman berbeda pandangan dengan Yasonna. Dia mengkritik upaya pengukuhan kewarganegaraan Arcandra oleh pemerintah. Menurut Benny, pemerintah tak seharusnya mengukuhkan itu lantaran Arcandra yang telah

membuat dirinya menjadi tidak memiliki kewarganegaraan. Bahkan, politisi Partai Demokrat ini menuding Arcandra sebagai pengkhianat karena telah memiliki dwikewarganegaraan.

"Kan bukan kita (Indonesia) yang buat *stateless*. Kalau negara yang buat *stateless*, itu masuk akal. Dia kan pengkhianat, yang sudah lama hidup di sini saja dipersulit. Ini jelas-jelas pengkhianat *kok* tiba-tiba ada pengukuhan," kata Benny.

Mahfud MD menjelaskan, proses pengembalian kewarganegaraan yang telah hilang itu harus mengacu pada Pasal 9 Undang-Undang 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Di antara syaratnya adalah harus membayar uang

pewarganegaraan ke kas negara dan sudah tinggal di Indonesia lima tahun berturut-turut atau selama minimal 10 tahun tidak berturut-turut. Selain itu orang tersebut tidak memiliki warga negara ganda setelah diberi WNI. "Cara lain melalui naturalisasi," ujar dia.

Maka keputusan Kemenkumham yang menyatakan Arcandra tetap WNI sesuai prinsip *non-apatrie stateless* dinilai kurang tepat. Apalagi, status WNI otomatis hilang setelah berkewarganegaraan ganda. Penetapan pun akan berlaku surut, yakni berlaku sejak punya warga negara ganda. Ilustrasinya tidak jauh

berbeda dengan akta lahir. Anak tetap dinyatakan lahir pada tanggal dia keluar dari rahim ibunya. Meskipun surat akta kelahirannya baru dibuat dan ditetapkan empat bulan berikutnya. "Kehilangan warga negara itu hanya mengumumkan, artinya *publication* bukan *promulgation*. Publikasi itu tidak menjadi syarat terjadinya sesuatu, hanya menjelaskan sesuatu," kata Mahfud.

Mahfud menuturkan, keputusan pemerintah itu sangat berpotensi digugat di pengadilan negeri. "Dalam waktu 90 hari ke depan (terhitung setelah surat ketetapan diterbitkan) bisa digugat. Bisa menjadi perkara baru," jelas dia. "Ini jadi ramai kan karena ada jabatan menteri itu," imbuh dia.

Belakangan memang begitu santer isu mengangkat kembali Arcandra untuk duduk kembali di kursi menteri ESDM. Presiden Joko Widodo dalam wawancara di Vientiane, Laos, sebelum pulang ke Indonesia, Kamis (8/9), menuturkan, dia akan meneliti terlebih dahulu. "Saya belum mendapatkan laporan secara penuh. Jadi, kronologis pemutusannya seperti apa. Dan kemudian sekarang sudah p e g a n g WNI," ujar Jokowi. (berbagai sumber)



Arcandra Tahar

Kepercayaan Publik Bisa Menurun

KOORDINATOR Konsorsium untuk Transparansi Informasi Publik (KUTIP) Hans Suta Widhya berpendapat, pengangkatan kembali Arcandra sebagai menteri ESDM berisiko tinggi karena berpotensi merusak kredibilitas Presiden Jokowi.

Padahal, kata Hans, Jokowi sudah terkena jebakan pertama kala ia mengangkat Arcandra yang berkewarganegaraan ganda sebagai menteri. Dampaknya, kegaduhan terjadi dan indeks kepercayaan publik terhadap pemerintah disebut Hans turun. Indonesia, menurut Hans, tidak kekurangan sumber daya manusia. "Banyak orang yang lebih hebat dari Arcandra kok. Banyak yang lebih paham ESDM," ujarnya, pekan lalu.

Dia mengingatkan Jokowi agar tidak terkena jebakan untuk yang kedua kali, dan dengan demikian mempersulit posisinya sebagai pemimpin Indonesia di masa depan. Dia mengusulkan agar Jokowi melakukan kalkulasi politik secara cermat untuk menghindari dampak fatal bagi pemerintahan yang dipimpinnya.

Arcandra Tahar telah dikukuhkan kembali sebagai warga negara Indonesia oleh pemerintah RI sejak 1 September 2016 — lima

minggu setelah ia dicopot dari jabatan Menteri ESDM.

Seiring dengan kembalinya status WNI Arcandra, Menko Luhut mengisyaratkan bahwa Presiden Jokowi akan segera melantik menteri ESDM. "Tugas saya (di ESDM) seminggu lagi. Saya sudah capek," kata Luhut.

Sementara pakar hukum tata negara Margarito, Kamis, mengatakan, andai Arcandra diangkat kembali menjadi menteri, hal itu tak dapat dipersoalkan karena status kewarganegaraan Arcandra kini jelas sebagai WNI. "Kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri itu dimonopoli sepenuhnya oleh Presiden. Penggunaan kewenangan ini tidak bisa dipertanyakan di pengadilan," kata dia.

"Secara hukum tata negara, dalam hal mengangkat menteri, syarat utamanya adalah WNI. Disebut WNI karena dia tidak memiliki kewarganegaraan lain," tambahnya. (nt/ris)

'Blunder Kedua Kali jika Tetap Diangkat'

ANGGOTA Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Presiden mengkaji ulang jika ingin mengangkat Arcandra menjadi menteri Energi dan Sumber daya Manusia.

Menurut dia, sejak kasus Arcandra mencuat, banyak masyarakat yang mempertanyakan ketidakjujurannya terkait status kewarganegaraannya.

Padahal, jika mau berkata jujur, seharusnya Arcandra bisa menyelesaikan masalah kewarganegaraannya dahulu, baru menerima jabatan menteri.

Oleh karena itu, lanjut politikus Partai NasDem ini, semua yang sudah dilakukan Arcandra tentunya berkaitan dengan integritas yang bersangkutan. Terlebih, masyarakat sudah melihat ada ketidakberesan yang sejak awal dipertontonkan.

"Sangat berbahaya bagi integritas

bangsa. Janga sampai seperti 'stand up comedy', naik turun, naik lagi. Walaupun hebat, pintar, luar biasa tetapi ini menyangkut integritas. Sejak awal sudah ada ketidakjujuran," papar Sahroni di sela pematongan hewan kurban.

Jika Presiden tetap memilih Arcandra, maka masyarakat juga akan melihat kesalahan atau 'blunder' yang kedua kali yang dilakukan. Kondisi ini dinilainya kurang baik bagi tingkat kepercayaan masyarakat.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menjelaskan dirinya masih melakukan pertimbangan mengenai Arcandra Tahar untuk kembali menjabat sebagai Menteri ESDM. "Sampai saat ini saya akan melihat dulu masalah yang berkaitan dengan kewarganegaraan, prosesnya," kata Jokowi.

Sementara itu Anggota Komisi III DPR,

”
Jika Presiden tetap memilih Arcandra, maka masyarakat juga akan melihat kesalahan atau 'blunder' yang kedua kali yang dilakukan. Kondisi ini dinilainya kurang baik bagi tingkat kepercayaan masyarakat.

Masinton Pasaribu mengatakan syarat agar Arcandra menjadi menteri kembali sudah terpenuhi pascapemerintah telah mengeluarkan surat keputusan, terkait status kewarganegaraan Arcandra Tahar.

"Seusai dengan undang-undang, untuk diangkat menjadi menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan, warga negara Indonesia. Ini status kewarganegaraan Pak Arcandra, sudah memperoleh kembali sebagai WNI dan telah dicatatkan resmi dalam lembaran negara," kata Masinton di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan, hal itu sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 22 ayat 2, yaitu ditegaskan untuk dapat diangkat menjadi menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan menjadi WNI.

Dia pun menyiratkan bahwa yang bersangkutan bisa saja atau layak menjadi menteri kembali, namun semuanya kembali kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Jika Presiden menganggap Arcandra layak diangkat menjadi menteri, maka pengangkatannya sudah sesuai aturan yang disyaratkan dalam Undang-Undang Kementerian Negara," ujarnya.

Menurut dia, semua ini tinggal bagaimana sikap dari Presiden karena pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

Dia menilai, Presiden tentu punya pertimbangan tersendiri untuk mengangkat para menteri yang akan membantu tugas-tugas Presiden dalam melaksanakan program pemerintahan yang dipimpinnya. (nt)